

### BAB III

## GOLKAR PADA PEMILU 1971

Sekber Golkar resmi berdiri tanggal 20 Oktober 1964 terdaftar sebagai salah satu kontestan dalam pemilu 1971. Kedekatan antara Sekber Golkar yang identik dengan pemerintah dan ABRI ialah salah satu sebab perolehan suara secara mayoritas yang diperoleh oleh Sekber Golkar. Strategi Pemerintah untuk memperlemah partai-partai adalah strategi untuk memperkuat Sekber Golkar pada pemilu 1971. Adanya hubungan ABRI sebagai penjaga keamanan negara, adalah bukti keterlibatan Sekber Golkar dengan ABRI dimana enam KINO dari tujuh KINO yang tergabung dalam Sekber Golkar dipimpin oleh perwira ABRI..

Berbagai usaha digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mempersiapkan Sekber Golkar dalam menghadapi pemilu 1971. Sementara ABRI di daerah-daerah selalu siap untuk mendukung segala upaya dari pemerintah untuk memperkuat posisi Sekber Golkar agar mencapai mayoritas pada pemilu 1971.

Dalam menjelaskan strategi yang digunakan oleh Sekber Golkar atau pemerintah dan ABRI, tidak lengkap rasanya bila tidak menjelaskan tentang adanya pergantian kekuasaan pada masa-masa kelahiran Sekber Golkar ini, yaitu masa awal Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Hal ini sangat penting untuk memahami yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru ini.

biasanya malam. Proses pembunuhan berlangsung relatif cepat, hanya beberapa bulan. Banyak sumber yang memberitakan jumlah korban pembantaian tahun 1965/1966 terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali. Jumlah korban pembantaian tahun 1965/1966 itu tidak mudah diketahui persis. Dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb, jumlah korban berkisar 78.000 jiwa - dua juta jiwa.<sup>86</sup>

Militer-militer pada masa ini menjadi semakin kuat, banyak jabatan dan perluasan lembaga militer yang lebih “admitrasif sifatnya. Sebagai gambaran saja pada awal 1971 hanya ada tujuh dari seluruh Gubernur di Indonesia, adalah sipil; sisanya militer dan lebih dari setengah Bupati adalah dari kalangan militer.<sup>87</sup> Sementara itu kalangan sipil yang mendukung Orde Baru ialah beberapa orang intelektual yang pada waktu itu sering mengadakan protes, dengan “demo”, menentang kebijakan Soekarno.<sup>88</sup> Pendukung Orde Baru ini juga datang dari para intelektual yang pro-Barat. Para akademisi yang selanjutnya menjadi penasihat dari perencanaan pemerintahan Soeharto. Untuk mempertahankan dukungan publik Soeharto sadar bahwa masalah pangan harus diselesaikan. Padahal ekonomi Indonesia benar-benar dalam kondisi yang kacau di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasehat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai “mafia Berkeley (antara lain Widjojo Nitisastro, M Sadli, Ali

---

<sup>86</sup> Robert Cribb dalam Asvi Warman Adam, *Kompas*, Pembantaian 1965 Kekerasan Terbesar dan Rekonsiliasi, 4 Desember 2000, hlm. 4-6.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>88</sup> Sudah diketahui sekitar 1960-an banyak organisasi pemuda dan mahasiswa yang menentang kebijakan Soekarno dengan Demo. Utamanya aksi yang menuntut penyelesaian seadil-adilnya terhadap pelaku G-30-S/PKI. Yaitu (KAPPI, KAMI, KAPI), juga KABI (buruh), KASI (sarjana), KAWI (guru) yang tidak sepihak dengan gerakan PKI.

Wardhana, Emil Salim dan Subroto".<sup>89</sup> Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiri. Laju inflasi 650% pada tahun 1966 menjadi 120% pada tahun 1967.<sup>90</sup> Pendapatan Income perkapita di Jawa Timur mengalami kenaikan dari 18.804 pada tahun 1969 dan meningkat 34.870 pada tahun 1973.<sup>91</sup> Dari angka ini tampak adanya pendapatan perkapita yang meningkat di propinsi Jawa Timur pada awal pemerintahan Orde Baru.

Soeharto juga berusaha menarik TNI dan berusaha mempersatukannya. Pada awal Orde Baru ini, menurut pasal 10 UUD 1945, "Presiden adalah panglima tertinggi" (Pangti). Sejak era 1966, digaung-gaungkan suatu tema pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Orde Baru membuktikannya dengan suatu,

---

<sup>89</sup> Bertepatan dengan itu menjelang 1960-an pemikiran Amerika dikuasai oleh minat besar terhadap ilmu sosial, khususnya teori modernisasi dan pembangunan. Berbagai studi komparatif terhadap negara berkembang dilakukan oleh para peneliti Amerika Serikat. Sebagai hasilnya terbitlah berbagai buku yang sangat berpengaruh bagi kaum intelektual di Negara berkembang seperti : *The Stages of Economic Growth: A non Communist Manifesto (1958)* karya Rostow; *The Political Development of the New States (1959)* Edward Shills; *The Achieving Society (1960)* oleh David Mc Clelland ; *The Politics of the Developing Areas (1960)* G.A Almond dan J.A Coleman; *The Role of the Military in Underdevelopment Countries (1962)* oleh John J. Johnson dan terpenting adalah *Political Order in The Changing Societies (1968)* kumpulan karangan Samuel P Huntington. Kampanye paling efektif dilakukan di universitas-universitas terkemuka di Amerika seperti Berkeley, Harvard dan MIT. Para intelektual dari negara berkembang sebagian besar menerima gagasan baru tersebut dengan suka hati. Para pengamat ajaran modernisasi dan pembangunan ini di negara masing masing mendapat julukan semacam Los Chicago Boys di Brasil dan Berkeley Mafia di Indonesia. Begitu pula kebanyakan perwira militer yang belajar di akademi militer Amerika ikut mempelajarinya (Feith , 1980). lihat Indro Cahyono, "Lahirnya Kelompok Bisnis Penyandang dana kekuatan yang mengaku sayap tengah", dalam *Tanah Air*, no. 3, bulan September tahun 1986.

<sup>90</sup> Marwati, *op. cit.*, hlm. 437. Angka ini mungkin akan ditingkatkan, namun dapat dijadikan gambaran karena pada saat itu kondisi perekonomian menjadi lebih baik dari masa Orde Lama. Juga, Amanat Kenegaraan, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>91</sup> Lihat Laidin Girsang, *Indonesia Sejak Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Lai ta, 1976), hlm. 196.

“Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada bulan April 1969. Ekonomi Indonesia pada masa itu mengalami perbaikan, masa-masa inflasi yang terjadi di tahun-tahun 1965-1966, mulai dapat dikendalikan.

Kota Jakarta pada masa ini menjadi simbol pertumbuhan ekonomi. Dibangunnya sekolah-sekolah baru, terminal baru, pasar-pasar baru, jembatan-jembatan baru serta jalan-jalan baru, tampaknya Jakarta sengaja akan dijadikan contoh bagi pembangunan untuk kota di Indonesia.<sup>92</sup> Sementara di masa 1970-1971 di Jawa Timur tercatat 119 rehabilitasi dan pembangunan jembatan, 28 perluasan irigasi, pembangunan 209 buah gedung SD, 28 rehabilitasi gedung SD dan Madrasah.<sup>93</sup>

Dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah memberi perhatian sepenuhnya kepada peningkatan produksi pangan. Rencana peningkatan produksi beras melalui Bimbingan Massal (Bimas) terus di selenggarakan. Dalam hubungan ini penyediaan pupuk, obat-obatan (insektisida), perbaikan saluran irigasi. Di samping beras dan sembilan bahan pokok, pemerintah juga membangun jalan, bendungan, jembatan, dan pengikutsertaan “*civic mision*” dari ABRI dalam proyek pembangunan.<sup>94</sup> Pada tanggal 10 Mei 1967 dibentuk Badan Urusan Logistik (BULOG)<sup>95</sup> melalui Keputusan Presiden No. 114/U/Kep/1967. Badan baru ini dirancang sebagai lembaga pembeli beras resmi milik negara. Pemerintah

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Pudji Rahardjo pada tanggal 21 Juli 2002 dimana pembangunan ini menurutnya melalui hutang pada pihak asing.

<sup>93</sup> Laidin Girsang, *Ibid.*, hlm. 407.

<sup>94</sup> Marwati, *op. cit.*, hlm.39.

<sup>95</sup> Penyediaan dan penyaluran beras untuk golongan Anggaran (anggota ABRI dan pegawai negeri) menjadi salah satu kegiatan rutin. Pada tahun 1971 tugas tanggung jawab Bulog diperluas dan

menginginkan penjualan Beras dengan harga yang murah, karena harga yang mahal, akan merusak kontruksi ekonomi pemerintah Orde Baru.

Pembangunan ekonomi dan keamanan, merupakan suatu yang utama pada masa Orde Baru. Anggapan bahwa sebenarnya usaha subversif, terhadap negara pada masa PKI, sebenarnya melawan ideologi negara; yaitu Pancasila. Kepopuleran Soeharto dan juga kenaikannya pada jajaran birokrasi, mengangkat citra militer khususnya angkatan darat (Kostrad). Keamanan dan stabilitas politik merupakan perhatian yang utama pada rezim ini. Sejak tahun 1966, hal ini sudah menjadi sesuatu yang berlebihan. Alasan keamanan ini seringkali menjadi pembenaran Orde Baru untuk menghilangkan hal-hal yang berbau komunis.

Kestabilan politik, yaitu keamanan akan membawa kondisi ekonomi Indonesia yang baik. Stabilitas politik sangat diperlukan untuk pembangunan lima tahun kedepan. Kekacauan keamanan akan menjadi ancaman pada pembangunan ekonomi, terutama investor luar negeri yang mengalami ketakutan atas kekacauan. Kestabilan politik yang tenang dapat dengan mudah diganggu oleh sinyalemen negatif, maka ABRI memperoleh hak-hak istimewa untuk menanggulangi keamanan negara.

Merupakan suatu pemikiran, apakah Soeharto terpengaruh oleh alur pemikiran Samuel P Huntington pada awal Orde Baru ini, karena pendekatan

---

*ditunjuk importir tunggal gula pasir dan gandum dan distributor gula pasir serta tepung terigu, sejarah Bulog, <http://www.dologdiy.tripod.com/index.htm>*

keamanan dengan stabilitas politik, merupakan sesuatu yang utama pada pemerintahan Soeharto.<sup>96</sup>

Tulisan Samuel P Huntington, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik menjadi syarat utama. Pembangunan membutuhkan kontrol terpusat yang ketat dengan konsekwensi disisihkannya partisipasi politik massa yang berpikiran tradisional.<sup>97</sup> Dalam implementasinya sudah barang tentu teori ini membutuhkan kerja sama antara golongan teknokrat dan golongan militer.

Melalui suatu pertumbuhan ekonomi, investasi dari luar negeri, pada masa itu rezim ini sama sekali tidak mempunyai suatu oposisi, nampaknya semua orang di Indonesia ingin bergabung dan mengambil bagian dari Orde Baru.<sup>98</sup>

Ketika pemerintahan yang didominasi militer di bawah Soeharto memutuskan untuk menggunakan Sekber Golkar sebagai alat legitimasi dalam Pemilihan Umum. Untuk menangkis tuduhan sebagai perampas kekuasaan maka organisasi politik sangat diperlukan sebagai proses legitimasi. Dilema yang dihadapi, yakni bagaimana merancang pemilihan umum yang dapat memperkuat legitimasi bagi Soeharto dan memungkinkan doktrin dwi-fungsi ABRI.<sup>99</sup> Upaya yang dipakai adalah

---

<sup>96</sup> Amerika telah memberi pendidikan dan latihan kepada 299 pejabat militer Indonesia di sana. Sejak Yani ditunjuk sebagai KSAD pada 1957, 150 perwira milite telah dikirim ke Amerika. Sampai pertengahan 1958 tercatat 300 perwira militer Indonesia berada di Amerika. Pendidikan Amerika tidak terbatas pada masalah teknologi persenjataan saja, melainkan juga masalah pada masalah sosial-politik dan ekonomi yang sangat luas. Bahan-bahan ini terangkum dalam apa yang disebut ideology militer Pax Americana. Soeharto seorang militer yang sangat mungkin memakai pendekatan ilmuwan sosial pembangunan terkenal (P. Hungtinton).

<sup>97</sup> Hungtinton, *Political Order in The Changing Societies* dalam Indro Cahyono, *op. cit.*, tanpa halaman.

<sup>98</sup> Presiden Soeharto pada masa itu, tidak mempunyai pesaing yang cukup vokal. Utamanya yang berani mengkritik secara tajam.

<sup>99</sup> William Liddle, *op. cit.*, hlm.137.

menghidupkan sebuah kelompok perwakilan yang bersifat heterogen dan disebut Sekber Golkar. Hal ini tentu saja tidak sulit karena Sekber Golkar sudah terwakili di tubuh Parlemen

Menurut Masashi Nishihari<sup>100</sup> Pemilihan umum 1971, hanya menekankan pemerintahan Suharto untuk mencapai suatu kemenangan dalam pemilihan umum daripada cara-cara yang mendukung penyelenggaraan Pemilu yang sesungguhnya. Pemerintahan Soeharto dan para pendukungnya ingin menggunakan Sekber Golkar sebagai alat untuk legitimasi politik. Sementara ABRI dalam mendukung Sekber Golkar memiliki kepentingan untuk menjaga dwi-fungsinya. Para pendukung sipil yang mendukung pemerintahan Soeharto ini mengatakan bahwa peranan sosial-politik ABRI harus diusahakan ditekan sampai ke titik nol.<sup>101</sup> Ucapan ini langsung mendapat tanggapan dari Mayjen H. Sugandhi (MKGR) yang mengatakan Rachman Tolleng terlalu banyak membaca buku-buku luar, dan tidak pernah berada dalam lingkungan ABRI. Kemudian Mayjen Djamin Ginting (GAKARI) mengatakan “Bisa saja peranan ABRI itu suatu waktu berkurang dan tak diperlukan, tapi “Dwi Fungsinya tetap. Ia bahkan menambahkan bahwa seperti main bola ABRI itu penyerang, kadang-kadang penyerang harus mundur membantu *back*.”<sup>102</sup>

Pada 5 September 1966 dalam kedudukannya sebagai Menhankam/Pangab Jenderal Soeharto mengeluarkan intruksi kepada kepala Staf ABRI untuk

---

<sup>100</sup> Masashi Nishihari, *op. cit.*, hlm. 3

<sup>101</sup> Kata Rachman Tolleng tokoh muda dari Golkar dalam *Tempo*, Satu Sekber Sekian Pandangan, 1 Mei 1971, hlm. 8

<sup>102</sup> *Tempo*, *Ibid.*, hlm. 8.

menyediakan semua fasilitas yang dimungkinkan bagi pengembangan Sekber Golkar dalam pelaksanaan tugasnya di tingkat nasional dan tingkat daerah.<sup>103</sup>

Propinsi Jawa Timur, yang pada masa pemilu 1955 dan sebelum G.30 S/PKI, mempunyai pengaruh yang kuat di Jawa Timur, namun kekuatan ini pada awal Orde Baru seakan musnah. Anggota partai komunis di Jawa Timur sebagian dibuang ke P. Buru, sebagian di penjara, sementara keluarganya diitimidasi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Pudji Rahardjo di awal Orde Baru terjadi banyak pembunuhan yang dilakukan oleh aparat TNI serta oleh massa terhadap anggota PKI.<sup>104</sup> Setelah masa 1966 kontrol terhadap partai komunis dan segala onderbouwnya diawasi secara ketat oleh para militer dari tingkat Kodam sampai Babinsa di desa-desa. Dari data di atas pemerintah di awal Orde Baru ini banyak memberikan pembangunan di daerah-daerah di Jawa Timur, pembuatan jembatan, perbaikan irigasi, pembangunan SD dan lain sebagainya. Tiap desa di Jawa Timur diberi bantuan dana.<sup>105</sup> Harga bahan pokok terutama beras yang pada masa Pemerintahan Soekarno kurang stabil menjadi stabil yang pemasarannya diatur oleh lembaga Bulog. Pembangunan dengan pendekatan pada kemajuan ekonomi sangat terasa di Jawa Timur pada awal Orde Baru.

---

<sup>103</sup> Leo Suryadita, *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>104</sup> Pudji Rahardjo, *Arus Balik G30 S' 65* (Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 1965 Jatim, khususnya halaman 70-156.

<sup>105</sup> Mengenai bantuan dana, lihat pada sub-bab peran birokrasi pada kemenangan Sekber Golkar, pada halaman selanjutnya.



## A. Penundaaan Pemilu

Pada Agustus 1966 diadakan seminar Militer di Bandung, dengan maksud untuk dapat mengimplemasikan pikiran-pikiran dari para Militer pada masyarakat mengenai pemilu.<sup>106</sup> Menurut seminar itu pemilihan Umum diadakan dengan sistem distrik dan kandidat yang dipilih harus tinggal di tempat daerah yang diwakilinya minimal selama 1 (satu) tahun. Seminar itu juga merumuskan penyederhanaan partai, menjadi lima kelompok: Islam, Kristen, Nasionalis, Sosialis Pancasila, dan Golongan Karya.<sup>107</sup> Seminar ini melarang keikutsertaan partai PKI dan anggotanya untuk sebagai kandidat atau untuk memilih. Untuk partai Masjumi, PSI, Murba, anggotanya adalah warga negara yang mempunyai hak pilih.

Kekuatan ABRI sebagai inti dari pemerintahan ditunjukkan dengan diimplementasikan hasil seminar tersebut. Tahun 1967 tiga undang-undang tentang pemilu dikirimkan oleh pemerintah kepada anggota DPR-GR, *pertama* tentang partai politik, *kedua* organisasi massa dan Golongan Karya, *ketiga* penyerderhanaan partai politik.

*Pertama* persyaratan bagi partai politik konstestan pemilu haruslah memiliki minimal 1,5 juta anggota dengan cabangnya harus ada di minimal 25 propinsi di Indonesia, dan memiliki perwakilan di 200 kabupaten di Indonesia. Setelah pemilu diadakan partai tersebut harus diwakili oleh sedikitnya 2% dari jumlah anggota DPR.

---

<sup>106</sup> Pemilihan Umum dan hasilnya bukan merupakan tujuan utama, namun stabilitas politiklah yang menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk memenangkan Orde Baru dan ideologi Pancasila. Seperti dikutip pada Sumbangan Pemerintah AD pada Kabinet Ampera (Jakarta: Angkatan Darat, n.d), hlm. 49, diambil dari Harold Cruch, *op.cit.*, hlm. 179

*Kedua* tentang pemilihan anggota MPR, DPR, dan DPRD. Berdasarkan hasil seminar Militer, yaitu penggunaan sistem distrik, dengan daerah pemilihan pada tiap kabupaten, dan kandidat yang diajukan harus tinggal selama satu tahun di daerah kabupaten yang diwakilinya. Kandidat harus diwakili oleh partai politik atau golongan karya sedangkan kandidat independent tidak diperbolehkan.<sup>108</sup> ABRI tidak memiliki hak suara dalam Pemilihan Umum.<sup>109</sup>

*Ketiga* berisi tentang struktur anggota MPR, DPR, DPRD. Setengah terdiri dari partai-partai politik dan setengahnya terdiri dari golongan karya. Setengah dari Golongan Karya adalah ABRI (atau sebesar 25% dari total anggota adalah ABRI).<sup>110</sup> Undang undang ini terdapat kelemahan tentang perimbangan antara golongan karya dan partai. Apabila partai politik melalui pemilu mendapatkan posisi MPR, DPR, DPRD, lebih dari setengah kursi Undang-undang ini tidak mengaturnya. Mengenai partai PKI diputuskan bahwa para anggotanya tidak diijinkan untuk ikut sebagai pemilih ataupun sebagai calon dalam pemilihan umum. Sementara partai Masyumi dan PSI, dinyatakan sebagai partai yang tidak pernah dilarang.

Partai-partai utama, seperti NU dan PNI dalam parlemen menentang undang-undang tersebut, yaitu tentang penggunaan sistem distrik dan juga penunjukkan yang besar bagi golongan karya yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah Soeharto melakukan negosiasi dengan partai-partai politik di DPR GR, di bulan Juli 1967 yang

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm 179

<sup>108</sup> Seperti pada pemilu 1955 terdapat partai atas nama perseorangan seperti nama R. Soedjono Prawirisoedarso, Koesadi P. M.

<sup>109</sup> Keputusan Seminar Militer menghendaki ABRI tidak memiliki hak pilih. Dan juga pada calon yang hanya tinggal selama 6 bulan, seminar militer menginginkan 1 tahun.

menghasilkan “*package agreement*” (paket persetujuan antara pemerintah dan partai politik), yaitu penggunaan sistem proposional. Sepertiga anggota MPR, akan ditunjuk oleh pemerintah sedangkan 100 dari 460 anggota DPR ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah juga menunjuk warga sipil yang tidak terkait dengan partai politik atau organisasi Golongan Karya yang tidak ikut dalam pemilu.<sup>111</sup>

Dengan diwarnai oleh perdebatan yang panjang tentang UU pemilu itu. Menunjukkan adanya keberatan dari partai-partai politik tentang penunjukan yang besar bagi organisasi golongan karya. Hal itu juga diwarnai aksi demo menentang UU pemilu dan syarat keanggotaan partai politik dari para pelajar di kota Bandung dan juga KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia).

Pemerintah berinisiatif menunda pemilu. Sidang Umum MPRS 27 Maret 1968 menerbitkan Tap MPRS No XLII/MPRS/1968 yang mengubah Tap MPRS No XI/MPRS/1966. Bunyinya “Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada 3 Juli 1971. Partai NU dan PNI sangat menolak mengenai penundaan pemilu ini, karena mereka yakin akan memperoleh dukungan suara yang banyak setelah tidak adanya partai PKI. Tetapi pemerintah berhasil memaksakan keinginannya untuk menunda pemilu.

Menurut Masashi Nishihari penundaan pemilu ini merupakan sesuatu yang direayasa oleh pemerintahan Soeharto dengan banyak memberikan rancangan UU Pemilu yang kontroversial, strateginya memberikan waktu bagi pemerintahan

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 181

Soeharto untuk memperbaiki ekonomi.<sup>112</sup> Mochtar Masoed<sup>113</sup> mengatakan pimpinan AD (Presiden Soeharto) tidak bersemangat menyelenggarakan Pemilu sangat jelas karena mereka tidak ingin kendali politik yang berada dalam pegangannya tergelincir hanya karena pemilu. Namun penundaan pemilu dalam waktu yang lama akan mengkristalkan kekecewaan masyarakat dan menimbulkan citra pemerintahan militer pada dunia Internasional. Presiden Soeharto menunda pemilu sengaja untuk mempersiapkan diri, agar legitimasi terhadap dirinya terjamin. Dengan mempersiapkan Sekber Golkar dalam menghadapi Pemilu yang diundangkan pada Juli 1971. Menurut Priyo Budi Santoso,<sup>114</sup> penundaan pemilu ini memberikan waktu bagi Presiden Soeharto dan para pendukungnya untuk merombak Sekber Golkar. Diketahui Sekber Golkar sangat heterogen dan meskipun didominasi militer, tetapi banyak dari para perwira militer itu sebagian besar para pendukung Soekarno, sehingga perlu waktu untuk dapat menempatkan orang-orang yang berorientasi Orde Baru dan pendukung Soeharto untuk dapat menduduki Sekber Golkar.

Dengan penundaan pemilu ini merupakan strategi dari pemerintah *pertama* dengan berusaha memperbaiki ekonomi agar masyarakat memberikan kepercayaannya pada pemerintah Orde Baru, *kedua* agar DPH di tubuh Sekber Golkar dapat diganti dengan orang-orang yang berpikiran dan pendukung dari Orde Baru, *ketiga* agar organisasi ini meskipun telah terwakili dalam Parlemen namun

---

<sup>112</sup> Masashi Nishihari, *op. cit.*, hlm. 6

<sup>113</sup> Mochtar Masoed, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, "Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto", (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1999), hlm. 90.

<sup>114</sup> Priyo Budi Santoso, *op. cit.*, hlm. 97-98.

belum pernah berperan sebagai kontestan pemilu, sehingga perlu dilakukan persiapan yang matang agar tercapai suara mayoritas dalam pemilu 1971 nanti sehingga menjamin tetap berkuasanya pemerintahan Orde Baru. Dengan ditundanya pemilu para pendukung Orde Baru mungkin merasa kekuatan dari partai politik perlu untuk dapat dikontrol, terbukti dengan campurtangan pemerintah pada kongres PNI, Parmusi dan juga IPKI, sehingga menghasilkan orang-orang yang pro-pemerintah. Lebih lanjut partai-partai tersebut tidak banyak menyuarakan kritik-kritik tentang kebijakan pemerintah yang mungkin menguntungkan Sekber Golkar.

Dengan penundaan Pemilu organisasi Sekber Golkar di Jawa Timur yang diketuai oleh Kolonel Soegianto juga mulai mempersiapkan diri, melalui tokoh Moch Said yang terkenal sangat anti komunis, dengan organisasi Ikatan Keluarga Brawijaya, kekuatan Sekber Golkar di Jawa Timur mulai diperkuat dan dikontrol.<sup>115</sup> Hal ini karena di masa sebelumnya Sekber Golkar di Jawa Timur mengalami kelambanan dalam pengorganisasian dan perkembangannya.<sup>116</sup> Jawa Timur yang diyakini sebagai basis dari partai NU, maka Sekber Golkar di Jawa Timur mengalami

---

<sup>115</sup> Moch Said sebagai mantan anggota Brawijaya yang dikaryakan. Di masa sebelum dan sesudah gerakan 30 September sering mengalami kondlik dengan partai komunis di Jawa Timur, pada masa Konferensi KWAA (Konferensi Wartawan Afro Afrika) di Surabaya Jatim pada 10 Jauri 1963, terjadi perebutan kepentingan antara kubu Komunis yang dipimpin oleh Djawoto-Satya Graha Karim. Ia kemudian menghimpun kekuatan dari militer untuk membendung usaha dari partai komunis dengan membentuk panitia dengan ketua kehormatan Wakil Gubernur Jatim Wiyono dan ia sendiri sebagai penasehat dari PWI Jawa Timur juga meberikan bantuan kepada Wiwiek Hidayat (*Antara*), yang ditunjuk sebagai ketua II, tulisan Wiwiek hidayat, pada buku Moch Said, *op. cit.*, hlm. 181-187. Ia juga sering direpotkan PKI dengan menjaga perusahaan hasil nasionalisasi di Jawa Timur saat demo partai komunis di Jawa Timur.

<sup>116</sup> Sehingga Sekber Golkar di masa 1971 sebenarnya banyak dikontrol dari pusat, wawancara dengan Heri Supriyanto, anggota Sekber Golkar semenjak 1971 pada 5 Januari 2003

sedikit kesulitan dalam perkembangannya.<sup>117</sup> Namun di tangan Moch Said Sekber Golkar kemudian sangat berkembang dan terbuka bagi masyarakat yang tidak terikat dengan partai politik untuk masuk menjadi anggota Sekber Golkar.

## B. Kebijakan Pemerintah pada Pemilu 1971

Pemerintah Orde Baru menjelang pemilu 1971 mengeluarkan berbagai macam peraturan yang sifatnya banyak merugikan partai politik. Hal ini mungkin dilakukan agar menjamin pemerintahan tetap di bawah pemerintahan Soeharto. Karena dengan lemahnya partai politik maka kekuatan Sekber Golkar yang identik dengan pemerintah semakin bertambah kuat. Selanjutnya pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan yang menguntungkan Sekber Golkar dari Permen No.12 hingga pelarangan nama Soekarno yang biasanya dihubungkan dengan partai PNI.

### 1. UU Pemilu dan Tata-cara Pelaksanaan Pemilu 1971

Setelah ditundanya Pemilu, pemerintah kembali berusaha menyiapkan ketentuan hukum tentang Pemilu. Berdasarkan pada "*packet agreement*" antara pemerintah dan DPR GR. Menurut UU pemilu DPR berjumlah atas 360 orang anggota, dan 100 (75 ABRI) orang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>118</sup> Semua anggota DPR

---

<sup>117</sup> Partai NU diyakini sangat besar peranannya di Jawa Timur pada masa itu, mereka mengandalkan dukungan dari para kyai, sehingga Sekber Golkar mengalami sedikit kesulitan dalam perkembangannya, wawancara dengan Hudan Dardiri pada tanggal 20 Desember 2002.

<sup>118</sup> Anggota DPR yang ditunjuk/diangkat oleh pemerintah adalah golongan karya Angkatan Bersenjata (ABRI) dan golongan karya bukan ABRI yang tidak ikut dalam pemilu, yang ditetapkan oleh Presiden, UU Nomor 16 1969 Bab II.5, pasal 4 dan pasal 5.

adalah juga anggota MPR. Anggota MPR berjumlah dua kali dari anggota DPR (920 orang), yang sepertiganya ditunjuk oleh pemerintah. Wakil-wakil dari DPRD Tingkat I (propinsi), akan dipilih perwakilannya duduk di kursi MPR.

Kesepakatan yang sulit dicapai adalah mengenai susunan anggota DPRD, pemerintah meminta 20% dari anggota DPRD ditunjuk oleh pemerintah. Partai-partai kecil dan golongan karya mendukung keinginan pemerintah tersebut. Namun partai politik antara lain PNI dan NU menolak penunjukan sebesar itu. Mereka menginginkan pengurangan dari jumlah anggota yang ditunjuk. Pemerintah Soeharto bersikeras pada pengangkatan sebesar 20% untuk anggota DPRD, pada bulan November 1969 akhirnya pemerintah berhasil membuat partai politik menerima tentang penunjukkan sebesar 20% dari anggota DPRD. Sekretariat Besar Golongan Karya mengusulkan bahwa organisasi yang diperbolehkan mengikuti pemilu adalah organisasi yang saat ini ada (terwakili) dalam DPRGR<sup>119</sup> Usul ini mendapat sambutan yang positif dari pemerintah, hanya partai-partai yang saat itu terwakili pada badan DPRGR yang berhak mengikuti pemilu.

Dengan mengacu pada UU Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan UU Nomor 16 tentang Susunan dan kedudukan MPR.DPR/DPRD. Warganegara yang berhak dalam pemilihan Umum adalah sudah genap berusia 17 tahun atau telah kawin (Bab IV, pasal 9). Adanya usia yang dimajukan dalam pemilihan umum, merupakan strategi pemerintah untuk memperoleh suara dari generasi muda, hal ini karena Sekber

Golkar adalah dianggap pembaharu yang didukung oleh generasi muda.<sup>120</sup> Berdasarkan ketentuan diatas pemilu yang berjangka waktu 16 tahun (1955-1971). Bagi orang-orang paling muda yang punya hak suara pada pemilu 1955 berumur 21 tahun ditambah dengan 16 tahun, umurnya akan sekitar 37 tahun. Orang-orang yang paling muda pada pemilu 1955 akan berumur 37 tahun. Sementara itu syarat 17 tahun yang ditetapkan, berarti pada masa pemilu 1955 mereka ini berumur satu tahun atau generasi muda masa pemilu 1971, waktu pemilihan umum 1955 setidaknya berumur tiga tahun, empat tahun atau enam tahun, yaitu umur-umur yang tidak mengerti kehidupan politik masa pemilu 1955.

Maka Sekber Golkar diharapkan akan memperoleh banyak dukungan dari generasi muda yang menganggap partai politik pada masa pemilu 1955 melakukan banyak kesalahan sehingga terjadi inflasi tinggi dan ketidakstabilan dalam politik di Indonesia pada masa itu dan organisasi Sekber Golkar adalah pembaruan dalam perpolitikan serta mencap dirinya bukan bagian dari partai politik, melainkan golongan yang berkarya dan membangun.

Pemerintah melarang warganegara yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam organisasi PKI untuk ikut serta dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih UU (nomor 15/1968 bab I, pasal 2 ayat 1). Dan melarang anggota PKI

---

<sup>119</sup> Harold Crouch, *loc. cit.*, hlm 185.

<sup>120</sup> Pada pemilu 1955 batas usia pemilih yang berhak adalah 21 tahun, Sekber Golkar dianggap kurang memiliki "grass root" pada generasi yang lebih tua karena Sekber Golkar resmi berdiri di tahun 1964.



menjadi anggota MPR/DPR.DPRD (UU nomor 15 tahun 1969 Bab I pasal 2 ayat (1) juga UU Nomor 16 Bab II.2, pasal 2d).<sup>121</sup>

Propinsi Jawa Timur telah berhasil menyusun dan menyiapkan panitia Pemilihan Umum Tingkat Propinsi. Pada akhir 1969 dengan ketua Gubernur H.M. Noer dan anggotanya dari pegawai pemerintah daerah Jawa Timur. Lembaga Pemilihan Umum di Jawa Timur disyakan oleh ketua panitia pemilu pusat dengan No. 37/1970 pada 9 Pebuari 1970.<sup>122</sup> Di setiap kabupaten dibentuk PPI II.<sup>123</sup> Serta pemungutan suara diadakan pada tingkat kecamatan.<sup>124</sup> Panitia Pendaftaran pemilih<sup>125</sup> diadakan di tingkat desa/kelurahan.

Setiap kepala eksekutif ditunjuk sebagai kepala dan bertanggung-jawab pada daerah pemilihannya, misalnya seorang Gubernur Jatim adalah ketua PPD I, seorang Bupati adalah Ketua PPD II, dan kepala desa (lurah) mengepalai Panitia Pendaftaran Pemilu. Dibentuk pula KPPS di setiap tempat pemungutan suara (TPS). KPPS di seluruh Indonesia berjumlah 236.277 sedangkan di Jawa Timur berjumlah 4.660

<sup>121</sup> UU Nomor 15 dan UU Nomor 16 tahun 1969 tentang Pemilu, selengkapnya perhatikan Lampiran.

<sup>122</sup> Lihat anonim, *Pemilihan Umum 1971 di Jawa Timur seri I*, (Pemda Jatim: Surabaya, 1971), hlm. 66-68 PPD I tugasnya: (i) Membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia, (ii) Mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan Anggota DPRD I dan DPRD II, (iii) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk DPRD I. PPD II di seluruh Indonesia berjumlah 281 sedangkan di Jawa Timur berjumlah yang terbanyak dibandingkan propinsi lain yaitu 37, PPD II tugasnya: (i) Membantu tugas-tuga Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, (ii) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk DPRD II.

<sup>124</sup> Untuk tugasnya lihat pada UU No. 15 dan No.16 tahun 1969 Panitia Pemungutan Suara dengan tugas: (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, (ii) Menyelenggarakan pemungutan suara.

<sup>125</sup> Tugasnya: (i) Membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan suara, (ii) Menyelenggarakan pendaftaran pemilih. Untuk petugas dari masing-masing penyelenggara pemilu adalah para pegawai pemda dan instansi lain yang dianggap perlu. <http://www.kpu.go.id/index.shtml>.

Untuk menjalankan Pemilu bagi WNI yang berada di luar negeri, dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri yang berkedudukan di Deplu, di Kantor Perwakilan RI di luar negeri didirikan PPS Luar Negeri, dan untuk tiap TPS di luar negeri diadakan KPPS Luar Negeri.<sup>126</sup>

Perbedaan yang kontras terjadi antara pemilu 1955 yang memberikan kekuasaan yang besar pada "Panitia Pemilu Pusat" dengan anggota terdiri dari wakil dari partai-partai politik kontestan Pemilu. Tugasnya mengatur dan membuat peraturan tentang tata-cara pemilihan Umum. Pada pemilu 1971 tampaknya kepala-kepala eksekutif dan para pegawai negeri dilibatkan dalam proses pemilihan umum. Kewenangan dari suatu pejabat eksekutif sebagai panitia, seringkali digunakan untuk menjamin suatu kemenangan dari suatu Orde Baru. Dimana dalam menjalankan tugas operasionalnya LPU di bawah departemen dalam negeri.<sup>127</sup> Departemen di bawah Amir Macmud yang menerbitkan surat monoloyalitas pada Sekber Golkar. Sehingga pengawas pemilu akan menggunakan kewenangannya dalam memenangkan Sekber Golkar untuk memperoleh suara mayoritas pada pemilu 1971.

Persiapan dalam pemilihan umum dibuat pada awal 1970.<sup>128</sup> Kampanye untuk partai-partai politik dan golongan karya ditetapkan dua bulan. Kampanye

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, tanpa halaman.

<sup>127</sup> LPU diketuai oleh Amir Macmud merangkap anggota, Oemar Senoadji wakil merangkap anggota, Budiardjo wakil ketua merangkap anggota, Menku (Prof. Ali Wardhana), Menhankam Pangab (Presiden Soeharto) diwakili oleh Pangabean (Wapangab), Menhub (Frans Seda), Menlu (Adam Malik), Masashi Nishihari, *op cit.*, hlm.13.

<sup>128</sup> Seperti pendaftaran pemilih, nama partai, tanda lambang partai jumlah anggota DPR yang ditetapkan, pengisian formulir bagi calon kandidat. Lebih detail diatur dari Januari-Juli 1970, yaitu pelaksanaan dan penjelasan demokrasi Pancasila, Juli-September, penjelasan tentang tata cara

berlangsung selama 60 hari (27 April - 25 Juni) berakhir pada seminggu sebelum hari pemilihan umum dilaksanakan 3 Juli 1971.

Tema kampanye sangat dibatasi utamanya berkenaan dengan masalah Pancasila dan UUD 1945, yang tidak dapat digantikan dan diperdebatkan lagi. Kemudian organisasi yang akan mengadakan rapat harus melaporkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya. Pada peraturan menteri yang dituangkan dalam Lembaga Pemilihan Umum, No 39/LPU/1971 Pasal 3; larangan bagi anggota peserta pemilu menggunakan nama Ir. Soekarno sebagai pemimpin Besar Revolusi...pasal 5 larangan pada pemakaian hal-hal yang menghina agama atau menyudutkan suatu golongan. Peraturan pelarangan nama Soekarno jelas sekali menurunkan massa PNI yang sebelumnya pada masa 1955 diuntungkan dengan hubungannya dengan Presiden Soekarno, kemudian mengenai partai-partai Islam penggunaan pancasila sebagai suatu ideologi dan melarang adanya penggunaan istilah negara Islam. Dengan ideologi Pancasila sedikit banyak akan menurunkan massa dari golongan Islam untuk memilih partai Islam karena tidak terdapatnya ideologi Islam.

Dalam menghadapi Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Mei 1970, Presiden dengan surat keputusan No.43 telah menetapkan organisasi-organisasi yang dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Organisasi politik yang ada dan mempunyai wakil di DPR/DPRD. Partai itu ialah:

1. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

---

*pemilihan umum*, Oktober-Maret, tata cara pemilihan umum diberikan sampai ke tingkat desa, Masashi, *Ibid.*, hlm. 15

2. Murba
3. Nadhatul Ulama (NU)
4. Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI. Perti)
5. Partai Katolik
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
7. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
8. Partai Nasional Indonesia (PNI)
9. Partai Syariat Islam Indonesia (PSSI)

Organisasi yang dapat ikut serta dalam pemilihan Umum ialah: Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).<sup>129</sup> Dan ABRI tidak memperoleh hak suara dalam pemilu.

Meskipun terdapat keberatan pada peraturan ketidakadaan ideologi Islam, dari partai NU dan Parmusi namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Apalagi ketika partai-partai Islam gagal pada waktu memperjuangkan piagam Jakarta sepanjang 1968-1969 pada sidang umum MPRS.<sup>130</sup> Sementara PNI telah menyetujui segenap organisasi massanya akan tetap menjauhkan diri dari kultus individu terhadap siapapun termasuk Ir. Soekarno.<sup>131</sup> Maka suatu protes dari UU ini terlebih dari propinsi Jawa Timur dimana kontrol dari kodam Brawijaya semenjak pergolakan di Blitar (1968) semakin ketat, protes-protes tersebut hampir tidak ditemui.

---

<sup>129</sup> Marwati Djoened, *op.cit.*, hlm. 427.

<sup>130</sup> Usaha mereka memaksukkan Piagam Jakarta pada sidang umum MPRS komisi II 1968 mendapat tentangan dari kaum wakil partai Kristen, PNI, dan ABRI.

<sup>131</sup> Paulus Widiyanto, *Prisma* edisi 20 tahun, hlm. 36.

## 2. Peraturan Menteri No. 12/1969

Pada Desember 1969 Amir Machmud mengeluarkan Peraturan Menteri, yaitu tentang pemurnian Golongan Karya. Golongan Karya yang duduk di MPR, DPR, dan DPR I dan II, akan digantikan, bila terbukti bergabung dengan partai politik. Juga mengenai perwakilan dari para alim ulama atau pendeta, akan ditarik dari keanggotaannya bila terbukti mempunyai hubungan dengan partai Islam atau partai Kristen.<sup>132</sup> Dari kebijaksanaan ini banyak menguntungkan Sekber Golkar, karena kemudian banyak anggota dari sekretariat golongan karya yang berafiliasi dengan partai politik tertentu digantikan. Pada awal 1970 pergantian besar-besaran terjadi, Ken Ward<sup>133</sup> menuliskan lebih dari separuh anggota DPR GR dari tingkat I dan tingkat II di Jawa Timur yang digantikan oleh peraturan ini. Peraturan ini oleh Subhan (tokoh muda NU), dikatakan ditinjau dari segi sudut formal, Permen No. 12, pada hakikatnya minimal harus diatur oleh undang-undang dan bukan oleh suatu peraturan menteri, dari sudut material peraturan ini tidak memenuhi syarat perundang-undangan.<sup>134</sup> Bahkan wakil-wakil partai NU di Jawa Timur mengadakan walk-out pada sidang DPRD GR ketika acara sidang berlangsung dan mengungkapkan penolakan atas permen. No.12.<sup>135</sup> Wakil-wakil ABRI serta wakil dari partai-partai kecil di DPR GR Jawa Timur sepenuhnya menyokong Permen No.

---

<sup>132</sup> Seperti dikutip dari *Pedoman 30 Desember 1969*, Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 11

<sup>133</sup> Ken Ward, *loc. cit.*, hlm. 12.

<sup>134</sup> Mochtar Mas'oeed, *op.cit.*, hlm. 92.

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 92-93.

12. Militer sangat diuntungkan dengan peraturan ini karena kemudian banyak dari anggota yang digantikan oleh peraturan ini kemudian kursi yang kosong tersebut diduduki oleh militer.

Dengan peraturan ini jumlah anggota golongan karya yang sangat pro pemerintah semakin bertambah di tubuh Parlemen. Hal ini karena penggantian masing-masing anggota Parlemen ditunjuk atas kehendak pemerintah. Hal tersebut bisa menguatkan posisi pemerintah pada badan legislatif. Sehingga keefektifitas legislatif sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak berfungsinya lembaga legislatif ini terbukti ketika Amir Machmud mengeluarkan peraturan monoloyalitas pada panitia pemilu 1971, lembaga legislatif tidak mengajukan keberatan pada pemerintah.

### **3. Peraturan Pemerintah No. 6/1970**

Pada bulan Februari 1970 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.6/1970. Mengenai larangan bagi pegawai negeri yang dilarang sebagai anggota partai politik. Mereka diberikan waktu enam bulan untuk memilih. Meninggalkan pekerjaannya dan aktif di partai atau tetap bekerja dan tidak lagi terlibat urusan partai politik apapun. Tidak diperbolehkan untuk aktif pada partai politik, artinya harus mempunyai monoloyalitas pada Pemerintah/Golkar<sup>136</sup> “Lebih jauh Amir Machmud

---

<sup>136</sup> Peraturan Pemerintah ini, sering diartikan bahwa semua pegawai negeri termasuk ABRI haruslah monoloyalitas terhadap Pemerintah. Pemerintah sering diartikan sebagai Golkar itu sendiri, Karena banyak para eksekutif menteri dan para komandan militer pada sekitar pemilu 1971 yang dengan terang-terangan mendukung dan menganjurkan untuk memilih Golongan Karya. Pemerintah

melancarkan pula memungut djanji setia di kalangan guru-guru sekolah”, dengan konsekuensi yang sama dengan yang digunakan pada pegawai negeri yang tidak rela pada monoloyalitas.<sup>137</sup>

Dalam peraturan ini ada indikasi bahwa pemerintah ingin mengurangi kekuatan partai politik dengan memutuskan hubungan partai politik dengan anggota pegawai negeri. Seakan menuntut kesetiiaannya para pegawai negeri pada pemerintah yang diindentikkan dengan Sekber Golkar. Lebih jauh hal ini merupakan strategi untuk memperkuat kekuatan Sekber Golkar dengan mengandalkan pada kekuatan birokrasi. Perlawanan para pegawai negeri tentu saja akan membahayakan posisi dari perseorangan tersebut, karena kemungkinan tidak dapat menaikkan citra dan pangkat pada atasan mereka, dimana atasan mereka adalah pendukung Sekber Golkar.

Perlawanan yang berlebihan tentu saja akan mengakibatkan pemecatan yang tentu saja hal akan mengancam roda ekonomi keluarga seorang pegawai negeri. Di daerah Bojonegoro Ken Ward menuliskan surat pembagian monoloyalitas pada pegawai negeri yang sebelumnya merupakan anggota partai PNI.<sup>138</sup> Dengan keluarnya peraturan ini para pegawai negeri yang terikat dengan partai NU dan Parmusi dan terutama partai PNI, dimana para pegawai negeri di Jawa Timur banyak yang menduduki kursi pimpinan-pempinan daerah menjadi berubah haluan mendukung Sekber Golkar. Lebih Lanjut atasan mereka Mendagri Amir

---

menghendaki Golkar menang karena “Golkar adalah koreksi total”, karena partai-partai politik tidak berhasil. ucap Brigden Soemantoro, Pangdam III/17 Agustus di depan Rapat Kerdja PGRI, Golkar Alternatif dan kemungkinan, dalam *Tempo*, 1 Mei 1971, hlm. 6.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>138</sup> Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 148

Machmud mendukung dan menerbitkan surat monoloyalitas ini. Partai NU di Jawa Timur sangat menentang pelaksanaan Permen No. 12 dan PP 6 yang mereka sebut sebagai intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka terpengaruh oleh Kolonel Soegianto (ketua Sekber Golkar Jawa Timur) yang memaksa kepada para lurah untuk tidak terlibat dalam partai politik. Amir Machmud di Jawa Timur bahkan dengan tegas memerintahkan untuk menusuk pohon beringin kepada para pegawai negeri, termasuk juga para lurah-lurah.<sup>139</sup> Dengan menggunakan pengajian partai NU semenjak 1970 telah melakukan perlawanan pada PP 6, menggunakan pengajian-pengajian yang mengkritik pemerintah. Pada 15-18 April 1971 di Jombang sebanyak 700 ulama NU dari seluruh Indonesia mengeluarkan "fatwa jombang", yaitu wajib hukumnya pada hukumnya bagi setiap umat Islam dalam pemilu nanti menusuk tanda gambar partai Islam, dengan tujuan memenangkan Islam dan menegakkan ajaran-ajaran-nya.<sup>140</sup> Namun fatwa ini segera disambut oleh Hafid Jusuf (ulama yang berafiliasi dengan Sekber Golkar) dalam mengimbangi "fatwa Jombang" mengeluarkan komentarnya: "tidak ada satu nashpun dalam Al Qur'an dan tidak ada satu hadistpun yang mewajibkan seseorang memilih parpol, bahkan di jaman dulu tidak ada partai-partai".<sup>141</sup> Sementara Hadisubeno juga mengadakan kritik kepada pemerintah, namun setelah diperingati oleh badan Kopkamtib dengan segera ia menarik ucapannya dan dihadapan pendukungnya ia mengatakan mendukung

---

<sup>139</sup> Lihat Golkar dan Alternatif kemungkinan dalam Tempo 1 Mei 1971.

<sup>140</sup> Mochtar Masoed, *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>141</sup> *Tempo*, "Tjara Pohon Beringin Bitjara", hlm.6



Pemerintahan Presiden Soeharto.<sup>142</sup> Sementara PNI di Jawa Timur di bawah Sundoro, telah terlebih dahulu diperlemah. Pertama terbunuhnya Surachman yang telah terbunuh akibat dituduh terlibat PKI.<sup>143</sup> Juga Sundoro dan Wasis (tokoh PNI Jawa Timur) yang mengalami konflik dengan kodim.<sup>144</sup> Sampai dengan 1970 PNI di Jawa Timur partai ini menjadi sasaran target dari badan-badan inteligen di tubuh kodam Brawijaya. Kodam bahkan mengumpulkan orang-orang di luar tubuh PNI di Jawa Timur dan mengatakan PNI perlu orang-orang yang baru yang berorientasi Orde Baru, ia bahkan mengatakan masih ada kesempatan bagi bagi PNI Ali-Suracman untuk kembali memimpin PNI.<sup>145</sup> Dengan adanya pengembosan ini maka PNI di Jawa Timur menjadi sangat berkurang kekuatannya sehingga kurang dapat menghimpun kekuatan dalam menghadapi pemilu 1971 serta kurang berani menentang kritik yang keras pada pemerintah.

### C. Pembentukan Badan Khusus

Pada masa awal Orde Baru semenjak pemerintahan Soeharto sejumlah organisasi sipil dan militer khusus telah dibentuk atau dikembangkan untuk tujuan-

---

<sup>142</sup> PNI kurang aktif dimungkinkan karena keadaan ketua Hadisubeno yang sakit dan akhirnya meninggal dunia pada April 1971, Ken Ward, *op.cit.*, hlm. 144.

<sup>143</sup> Ia terbunuh di Blitar (1968), perhatikan adanya perpecahan antara PNI di masa sebelumnya, yaitu antara Ali-Suratman dan Osa-Usep, Hadisubeno, Hardi, dan Sundoro merupakan PNI dibawah Osa-Usep, keterangan mengenai PN lihat Paulus Widiyanto Osa Malliki dan Tragedi PNI, dalam *Prisma* edisi khusus 20 tahun, hlm. 9-40.

<sup>144</sup> Sundoro dan Wasis dicap sebagai kepala batu dan tidak mau bekerjasama oleh Kodam Brawijaya Jenderal Yasin, seorang jenderal yang memimpin operasi Trisula dalam pemberontakan PKI di Blitar Selatan di tahun 1968.

tujuan pengawasan dan pengendalian penduduk Indonesia. Institusi-institusi yang berdiri itu mempunyai kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah, terutama dalam menerobos birokrasi di tingkat sipil maupun militer. Dalam perkembangannya organisasi ini secara tidak langsung membantu Sekber Golkar dalam memperkuat posisinya, misalnya Opsus dengan usahanya memperlemah partai-partai politik dan memperkuat Sekber Golkar dengan mensponsori organisasi-organisasi yang kemudian memutuskan bekerjasama atau bergabung dengan Sekber Golkar. Dalam perkembangannya Opsus bekerjasama dengan bapilu sebagai badan kampanye Sekber Golkar dalam menghadapi pemilu 1971.

### **1. Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban**

Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Memiliki kewenangan untuk menyaring nama-nama kandidat calon anggota Perwakilan rakyat yang diajukan oleh partai politik dan golongan karya<sup>146</sup> Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer dan non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini. Organisasi yang dibentuk pada 10 Oktober 1965. Lembaga ini memiliki wewenang yang dapat menerobos kewenangan dari sipil sampai militer serta berhak memperdayakan seluruh sumber daya negara Indonesia untuk dapat menanggulangi ancaman terhadap negara, ideologi negara Pancasila dan UUD 1945

---

<sup>145</sup> Daniel Dhakidae, *Pemilihan Umum di Indonesia*, "Saksi Pasang Nail dan Surut", dalam seri *Prisma* dengan judul *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986.), hlm. 191-193. Juga Ken Ward, *op cit.*, hlm. 143

<sup>146</sup> Keterangan yang rinci mengenai Kopkamtib lihat Richard Tanter, tentang Kopkamtib, <http://www.fortunecity.com/millennium/oldemil/498/links/.html>

atau pun pembangunan ekonomi. Status hukum Kopkamtib dibentuk berdasarkan Supersemar.<sup>147</sup>

Pada pemilu 1971 ini Kopkamtib memiliki kewenangan untuk mencoret kandidat DPR/DPD tanpa perlu menjelaskan secara terperinci mengapa hal itu (pencoretan) dilakukan. Kopkamtib ada di tiap di ada di tingkat pusat, propinsi, sampai di tiap kabupaten.

Masalah kandidat anggota DPR dan DPD ini, dipastikan anggota partai Komunis Indonesia tidak dapat masuk sebagai calon kandidat. Kontroversi mulai timbul pada soal partai Masyumi dan PSI, pada bulan 4 Februari 1970 Amir Machmud mengumumkan bahwa 2.500 anggota Masyumi dan PSI, diperbolehkan sebagai calon pemilu namun dilarang dalam pencalonan untuk anggota Badan Perwakilan Rakyat,<sup>148</sup> namun diralat oleh Ali Murtopo bahwa yang dikatakan oleh Amir Machmud hanyalah sebagai contoh, Ali mengatakan bahwa hanya akan ada tujuh, sepuluh sampai lima-belas orang saja yang tidak diijinkan untuk menjadi calon anggota (kandidat).

Pada pendaftaran pemilu 1971 pengurangan dari daftar nama calon yang diajukan sebagai anggota badan rakyat tercatat beberapa nama yang dicoret oleh kopkamtib di Jawa Timur dari lima puluh tiga calon yang diajukan oleh Sekber Golkar dicoret berjumlah satu orang, sedangkan calon NU dari delapan puluh empat

---

<sup>147</sup> Komandan Kopkamtib adalah Jenderal Maraden Pangabean 1969-1973, wakilnya Letjen Sumitro Menurut Richard Tanter dalam artian organisasional dan hukum, Kopkamtib berada dalam tubuh badan-badan keamanan internal militer darurat yang dimulai sejak deklarasi hukum darurat perang tahun 1957. Badan-badan tersebut memberikan komando militer regional suatu kekuasaan yang luar biasa besarnya di atas penduduk sipil.

calon yang diajukan dicoret satu orang, dari Parmusi dari tiga puluh delapan nama yang diajukan dicoret tiga belas nama, sedangkan PNI dari seratus dua puluh lima yang diajukan dicoret sejumlah tiga puluh tiga orang.<sup>149</sup>

Berdasarkan banyaknya nama yang dicoret, nampak sekali adanya suatu kewenangan yang mutlak pada badan ini dalam menyaring daftar calon anggota badan rakyat. Bila diperhatikan hanya terdapat satu orang yang dicoret dari daftar calon yang diajukan oleh Sekber Golkar, sedangkan dari PNI jumlah calon yang dicoret berjumlah tiga puluh tiga orang, merupakan "pengembosan" yang dibuat oleh badan ini dalam tubuh PNI.

## 2. Operasi Khusus

Ali Murtopo juga sebagai asisten pribadi presiden, mendapat tugas untuk menggalang kekuatan bagi Sekber Golkar yang nantinya digunakan dalam pemilu 1971, mendirikan opsus kemudian membentuk kelompok cendekiawan dan politisi yang dekat dengannya yang tergabung dalam kino Karya Pembangunan.

Menurut Mohtar Masoed,<sup>150</sup> ada tiga kelompok cendekiawan dan politisi disekitar Ali Murtopo. Kelompok *pertama* terdiri dari Lim Bian Kie (Yusuf Wanandi), Liem Bian Khoen (Sofyan Wanandi), Harry Tjan Kie dan Moerdopo. *Kedua* golongan yang tidak memberikan simpatinya pada golongan Islam, yaitu

---

<sup>148</sup> Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 15.

<sup>149</sup> *Daftar Tjalon Tetap Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1971 dari Orpol Golkar*, (mimeo., April 20 1971). Lihat lampiran 9.

<sup>150</sup> Mohtar Masoed, *op. cit.*, hlm. 77-79.

calon yang diajukan dicoret satu orang, dari Parmusi dari tiga puluh delapan nama yang diajukan dicoret tiga belas nama, sedangkan PNI dari seratus dua puluh lima yang diajukan dicoret sejumlah tiga puluh tiga orang.<sup>149</sup>

Berdasarkan banyaknya nama yang dicoret, nampak sekali adanya suatu kewenangan yang mutlak pada badan ini dalam menyaring daftar calon anggota badan rakyat. Bila diperhatikan hanya terdapat satu orang yang dicoret dari daftar calon yang diajukan oleh Sekber Golkar, sedangkan dari PNI jumlah calon yang dicoret berjumlah tiga puluh tiga orang, merupakan “pengembosan” yang dibuat oleh badan ini dalam tubuh PNI.

## 2. Operasi Khusus

Ali Murtopo juga sebagai asisten pribadi presiden, mendapat tugas untuk menggalang kekuatan bagi Sekber Golkar yang nantinya digunakan dalam pemilu 1971, mendirikan opsus kemudian membentuk kelompok cendekiawan dan politisi yang dekat dengannya yang tergabung dalam kino Karya Pembangunan.

Menurut Mohtar Masoed,<sup>150</sup> ada tiga kelompok cendekiawan dan politisi disekitar Ali Murtopo. Kelompok *pertama* terdiri dari Lim Bian Kie (Yusuf Wanandi), Liem Bian Khoen (Sofyan Wanandi), Harry Tjan Kie dan Moerdopo. *Kedua* golongan yang tidak memberikan simpatinya pada golongan Islam, yaitu

---

<sup>149</sup> *Daftar Tjalon Tetap Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Tahun 1971 dari Orpol Golkar*, (mimeo., April 20 1971). Lihat lampiran 9.

<sup>150</sup> Mohtar Masoed, *op .cit.*, hlm. 77-79.

Sumiskum, Sulisty, Sugiharto, Soekarno dan Soeroso. *Ketiga* adalah kelompok Bandung dengan tokohnya Racmat Tolleng dan Midian Sirait. Lebih lanjut untuk membuat kampanye Sekber Golkar dibuat badan khusus, bapilu; dimana bapilu dalam perkembangannya dibantu oleh Opsus yang telah berdiri terlebih dahulu. Bapilu ini diduduki oleh para mantan pemimpin mahasiswa, utamanya dari unsur Katolik (Lim Bian Kie, Lim Bian Khoen, Cosmas Batubara, Rahman Tolleng dan David Napitupulu).<sup>151</sup> Kelompok Ali Moertopo ini tampaknya ada semacam ketakutan, dimana mereka telah diperingati oleh Piagam Jakarta. Kelompok yang memiliki rasa anti pada negara Islam ini, merasa takut akan kelompok di luar Islam akan dipingirkan dalam kehidupan politik di Indonesia. Kelompok-kelompok intelektual ini digunakan oleh Ali Murtopo untuk memperkuat Sekber Golkar.

Opsus dibentuk pertama kali bertujuan untuk mengemban misi meintegrasikan Irian Barat pada wilayah Indonesia, di tahun 1969 operasi khusus diketuai oleh Ali Murtopo yang juga menjabat sebagai asisten Presiden Soeharto.<sup>152</sup> Opsus juga mengambil bagian penting dalam peranannya dalam penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia. Dalam menjalankan misi ini Opsus dikatakan sangat berhasil dengan baik.

Awal-awal Orde Baru Opsus memainkan peranan yang besar bagi perkembangan Sekber Golkar. Misalnya:

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>152</sup> Krissantono, "Ali Murtopo di atas panggung Orde Baru, Tokoh Pembangunan dan Pembaruan Politik Orde Baru", dalam Prisma, *op. cit.*, hlm. 138-139.

Pada seminar Nasional PNI pada bulan April 1970, mengadakan pemilihan ketua baru, dengan calon Hardi dan Hardisubeno. Di dalam kongres itu didesas-desusukan isu negatif soal Hardi yang anti Dwi fungsi ABRI dan kurang disukai pemerintah. Kurang setuju pada permen 12 dan ia mungkin akan menghubungkan PNI dengan partai politik yang lain, sebaliknya Hadisubeno lebih disukai pemerintah. Campur tangan Opsus yang dimotori oleh Ali Murtopo dan Sudjono Humardhani melakukan banyak intimidasi sebelum dan sesudah kongres.<sup>153</sup> Salah satu pendukung Hardi mengeluh kepada pers, “kalau benar Presiden tak mau campur tangan, kenapa asisten-asisten pribadinya masih berani membawa-bawa namanya secara kasar.”<sup>154</sup> Pada akhirnya Hardisubeno terpilih sebagai ketua PNI. Kemudian Hardisubeno mengumumkan bahwa PNI menerima peraturan tentang permen 12 dan mengungkapkan keinginannya untuk bekerjasama dengan ABRI.

Pada bulan Agustus 1966, berkumpul sembilan organisasi muslim<sup>155</sup> dan berniat mendirikan partai Islam baru. Partai secara resmi berdiri pada 20 Februari 1968. Pada Kongres Parmusi yang diadakan pada bulan 6 November 1968, di Malang (Jatim) menghasilkan susunan panitia yang sebagian besar adalah mantan

---

<sup>153</sup> Kubu Hardi selalu dirugikan oleh oleh panitia kongres, yaitu banyak utusan dari Hardi sulit untuk masuk ke dalam ruangan serta banyak susunan acara yang mendadak diganti tanpa sepengetahuan kubu Hardi, Paullus, *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>154</sup> Kehadiran Ali Murtopo dan Sudjono Humardhani pada kongres PNI, “Soedjono Humardhani dan Orde Baru, Aspri Presiden Bidang Ekonomi 1966-1974”, edisi khusus 20 tahun 1971-1991 *Prisma*, *op. cit.*, hlm. 113

<sup>155</sup> Yang dimaksud sembilan organisasi muslim itu adalah: Muhammadiyah, Al Djamiatul Waslijah, Gasbindo, Persatuan Islam, Nadhatul Wathan, Mathalaul Anwar Sarekat Nelayan Islam Indonesia, Kesatuan Buruh Indonesia Muslimin, dan Persatuan Umat Islam. Masashi Nishiari, *op. cit.*, hlm. 8.

anggota partai Masyumi.<sup>156</sup> Tokoh-tokoh Masyumi yang memimpin Parmusi menjadi kekuatiran tersendiri dari Pemerintah, terbukti kemudian dengan campur tangan pemerintah dengan Opsusnya serta telegram dari Sekretaris negara yang menolak susunan panitia hasil kongres dan kembali memberikan kedudukan ketua kepada ketua sebelum kongres, yaitu Djarwani Hadikusomo dan Lukman Harun. Pada bulan Oktober 1970 pemimpin-pemimpin Masyumi kelompok kedua mengambil alih Parmusi. Kelompok yang dipimpin John Naro dan Imran Kadir, bekerjasama dengan Opsus.<sup>157</sup> Mendirikan Parmusi di luar pimpinan Djarwani-Lukman. John Naro dan Ali Imran Kadir mendatangi menteri dalam negeri Amir Machmud dan Kepala Hankam Darjatmo untuk minta persetujuan dan pengakuan, kelompok John Naro dan Imran Kadir selalu memojokkan Djarwani-Lukman sebagai tidak dapat bekerjasama dengan pemerintah dan anti pemerintah.<sup>158</sup> Setelah terjadi konflik antara dua Parmusi Presiden Soeharto kemudian berusaha mendamaikan antara pemimpin Parmusi lama dan Parmusi yang dibentuk oleh John Naro dan Imran Kadir. Ia menunjuk salah-satu orang yang loyal pada pemerintah Mintaredja, sebagai ketua Parmusi.

Tampaknya pemerintah sengaja melemahkan posisi dari Parmusi karena pemerintah mungkin merasa kuatir pada massa Masyumi yang demikian besar pada pemilu sebelumnya. PNI dan Parmusi, yang mengalami perebutan pimpinan

---

<sup>156</sup> Masyumi merupakan partai yang besar pada pemilu 1955. Kemudian partai ini dilarang Soekarno pada 1960, dituduh terlibat dengan PRRI, terpilih sebagai ketua adalah Mohammad Roem (mantan tokoh Masyumi) juga Mohamad Natsir dan Kasman Singodimejo (keduanya tokoh Masyumi).

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Hartono Mardjono, mantan Ketua PPP DKI Jakarta (1977), dimuat dalam Masa sih, "Sistem akan melindungi kepentingan koruptor".  
<http://visit.geocities.com/visit.gif>

<sup>158</sup> Mochtar Masoed, *op. cit.*, hlm. 89. Dan Masashi Nishihari, *op. cit.*, hlm. 22.



nampaknya adalah pengurangan kekuasaan yang dilakukan oleh Opsus dalam mengurangi kekuatan mereka sebelum pemilihan umum 1971 dilangsungkan.

Opsus juga terlibat campur tangan dalam seminar nasional IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) pada bulan Mei 1970, yang kemudian mendudukan wakil-wakil yang pro pemerintah. Pada pemilu 871 para pimpinan IPKI menyatakan akan bekerjasama dengan Sekber Golkar.<sup>159</sup> Opsus juga terlibat dalam Kongres Nasional PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) pada 22 Oktober 1970 dengan calon ketua Rosihan Anwar (*Pedoman*), Jacob Utama (*Kompas*), serta B.M. Diah (*Merdeka*), yang terakhir ini didukung oleh Opsus dan kemudian menghasilkan ketua terpilih B.M. Diah.<sup>160</sup> Campur tangan Opsus juga terjadi pada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) pada kongres nasional tanggal 13-19 Oktober 1970 serta pada Persahi (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia). Keduanya dari organisasi akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam tubuh Sekber Golkar dalam KINO Karya Profesi. Dengan campur tangan dari Opsus membuat pemerintah berhasil mendudukan orang-orang yang pro pemerintah untuk duduk pada organisasi-organisasi profesi dan partai politik. Sehingga tidak langsung tidak ada lagi lawan yang kuat bagi Sekber Golkar dalam menghadapi pemilu.1971.

Hasil kerja Opsus lagi-lagi ditunjukkan dengan lahirnya GUPPI, yaitu organisasi yang telah lama tidak melakukan kegiatannya lagi, organisasi yang mempunyai massa sekitar 3.000 orang ini dapat aktif kembali dengan sponsor dari

---

<sup>159</sup> Kesimpulan wawancara dengan Hudan Dardiri, tanggal 20 Desember 2002

Brigadir Jenderal Sudjono Humardhani. GUPPI kemudian mengadakan munas di Jakarta. Pada hari terakhir musyawarah dalam jumpa pers, juru bicara GUPPI mengumumkan akan berkerjasama dengan Sekber Golkar.<sup>161</sup> Di Jawa Timur Opsus juga mensponsori badan keagamaan LEMKARI yang akhirnya bergabung dengan kino GAKARI dalam tubuh Sekber Golkar.

Badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah ini dalam perkembangannya menerapkan strategi untuk melemahkan partai-partai yang dianggap peninggalan dari Orde Lama, tampak dari upaya pelarangan yang begitu besar pada calon yang diajukan oleh partai PNI dan juga Parmusi serta pengumuman dari Amir Machmud yang mengatakan akan ada pelarangan dari anggota Masyumi dan PSI untuk dapat menjadi calon anggota legislatif. Lembaga Opsus yang dalam menjalankan tugasnya tidak terikat, dapat menerobos birokrasi militer dan sipil melakukan usaha memperkuat Sekber Golkar. Pendirian dari GUPPI dan Lemkari sehingga pendukung dari Sekber Golkar bertambah dari pendukung organisasi tersebut. Hasil kerja Opsus dalam campur tangannya pada kongres nasional beberapa profesi sehingga dapat mendudukan orang-orang yang pro pemerintah sehingga organisasi tersebut memutuskan tergabung dalam Sekber Golkar.

Operasi opsus di Jawa Timur dibawah kontrol Pitut Soeharto, dimana tujuan dari organisasi ini memberi pengaruh bagi penciptaan pengambilan keputusan di

---

<sup>160</sup> Soemitro, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa Malari 1974*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hlm. 45-47.

<sup>161</sup> Pembahasan lebih jauh dari GUPPI lihat pada bab selanjutnya.

tingkat pusat.<sup>162</sup> Organisasi ini mempunyai dana yang cukup banyak sekali, yang menurut kesaksian dari Soemitro dari kesaksiannya Soedjono Humardhani merupakan orang yang berwenang pada pendanaan Opsus. Selain itu Opsus juga melaksanakan penyelundupan besar-besaran agar barang di dalam negeri menjadi murah pada 1970-an.<sup>163</sup> Opsus di Jawa Timur sangat andil besar pada kongres Parmusi di Malang yang akhirnya menginformasikan hasil kongres tersebut sehingga dengan cepat pemerintah menolak susunan panitia dan menunjuk ketua yang baru yang pro pemerintah. Opsus di Jawa Timur juga sangat terlibat dalam mengalang kekuatan kelompok Islam dari kalangan DI, yaitu Hispran (Haji Ismail Pranoto).<sup>164</sup> Karena keberatan dari berbagai pihak, terutama dari para petinggi divisi Siliwangi. Peran Opsus di tubuh organisasi Hispran dikurangi dan kemudian dukungan lebih intensif dipusatkan pada organisasi GUPPI dan Lemkari di Jawa Timur. Kedua organisasi tersebut menjadi lebih besar karena disponsori oleh Opsus.

#### D. Pembentukan Organisasi Islam

Masyarakat Jawa Timur adalah sebagian besar pemeluk agama Islam adalah tidak dapat dipungkiri lagi untuk itu Sekber Golkar, yang pada pemilu 1971 sering pula disebut sebagai Golkar, yaitu organisasi yang memutuskan untuk ikut pemilu. Melalui Opsus dan Bapilu (Amir Moertopo) dan beberapa tokoh pemerintahan dan

---

<sup>162</sup> Soemitro, *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>163</sup> Waktu itu menjelang lebaran, beberapa kapal dari Singapura masuk menyelundupkan teksil dan baju jadi dan Opsus terlibat di dalamnya, Soemitro, *Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>164</sup> Anggotanya terdiri dari Hispran, Adah Djaelani, Danu serta dua putra Kartosuwiryo Dodo Muhammad dan Tahmid Rahmat. Terkenal juga dengan nama komando jihad, *Ibid.*, hlm. 93.

Sekber Golkar menghidupkan kembali GUPPI (Gabungan Usaha-Usaha Perbaikan Pendidikan Islam), yang didirikan pada tahun 1952. Organisasi yang hampir tidak menjalankan aktivitasnya lagi ini, anggotanya sebagian besar terdiri dari guru-guru agama.

Potensi GUPPI di tubuh Sekber Golkar, tidak dapat dipandang kecil. Golkar mendapat suntikan legitimasi dukungan umat Islam yang cukup berarti. Di saat banyak tokoh Islam menentang rekayasa politik Golkar, GUPPI berhasil menarik sekitar 3.000 guru pesantren bergabung ke GUPPI.<sup>165</sup> K.H. Hasbullah Bakri, tokoh GUPPI, membuat tema kampanye lima sebab umat Islam perlu mendukung Golkar.

1. Sekber Golkar melakukan pembangunan yang nyata dan bermanfaat, yang dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah "amal saleh".
2. Sekber Golkar ingin menghilangkan bekas-bekas dan hasil-hasil negatif dari aktivitas parpol dalam membina pemerintah selama ini, yaitu perjuangan ideologi politik.
3. Sekber Golkar mempunyai rencana pembangunan yang menuju masyarakat adil dan makmur, dan tidak sekedar ngomong.
4. Sekber Golkar mempunyai rencana yang baik terhadap pembangunan Islam di Indonesia.
5. Tidak ada satu alasan pun yang menghalangi umat Islam menyokong Golkar.

---

<sup>164</sup> Anggotanya terdiri dari Hispran, Adah Djaelani, Danu serta dua putra Kartosuwiryo Dodo Muhammad dan Tahmid Rahmat. Terkenal juga dengan nama komando jihad, *Ibid*, hlm. 93.

<sup>165</sup> Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 42, 77, dan 82

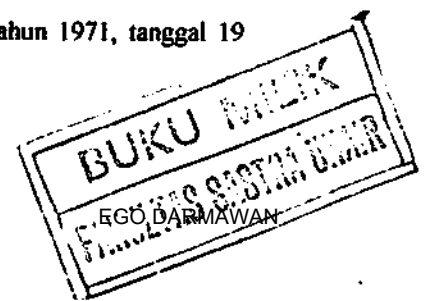
Menurut Saleh Fakur GUPPI ini mempunyai program yang utama, yaitu: kerukunan antar umat Islam dan kerukunan antara umat Islam dengan pemerintah. GUPPI ini adalah badan yang semi pemerintah,<sup>166</sup> dimaksudkan pemerintah ikut campur dalam masalah pendanaan dan kebijakan organisasi.

Pada Kongres GUPPI, yaitu tanggal 25 sampai 28 Januari 1971 pembina sekaligus pelindung GUPPI Sudjono Humardhani sebagai pembicara, dihadiri pula oleh Ali Murtopo, Kolonel Sapardjo (Sekjen Sekber Golkar), serta Jenderal Darjarmo. Hal tersebut membuktikan keterlibatan para orang-orang dekat Soeharto dengan lembaga ini.

Pendirian dari GUPPI juga mempengaruhi partai NU, terlepas dari seberapa jauh pengaruhnya tidak dapat diperoleh jumlah secara pasti namun hal ini adalah pasti terjadi, misalnya K.H. Sjarifuddin M.A. Ketua umum GUPPI dan berkedudukan sebagai Kepala Direktorat Pendidikan Agama dalam Departemen pimpinan K.H.Dachlan (Agama), ia juga seorang tokoh PERGUNU (Persatuan Guru Nadhatul Ulama ini mengatakan partai politik tidak berhasil melaksanakan programnya, ia menjelaskan mengapa ia kini bersama GUPPI yang kini menyiapkan suara pada Sekber Golkar.<sup>167</sup> Keberadaan GUPPI tentu saja akan memperkuat keberadaan Sekber Golkar sebagai partai nasionalis yang membutuhkan dukungan dari kalangan Islam, strateginya adalah agar orang-orang Islam terutama anggota dan pendukung GUPPI dapat memilih Sekber Golkar.

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan Fakhri Sakur mantan ketua GUPPI Surabaya tahun 1971, tanggal 19 Nopember 2002



Opsus juga berusaha memberikan andil bagi perkembangan kelompok religius LEMKARI<sup>168</sup>, yang nantinya bergabung dengan kino Gakari di tubuh Sekber Golkar. Kelompok yang berasal dari Jawa Timur, yaitu:

1. Desa Burengan Banjaran, di tengah-tengah kota Kediri, Jawa Timur.
2. Desa Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang, Jawa Timur.
3. Desa Pelem di tengah-tengah kota Kertosono, Kab. Nganjuk, Jawa Timur

Pemimpin dari Organisasi ini bernama Madigol Kadzdzab. Nama kebesaran dalam aliran kelompoknya adalah Al-Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir. Dan nama kecilnya ialah Madekal/Madigol atau Muhammad Medigol, seorang penduduk asli di Jawa Timur. LEMKARI sebenarnya merupakan organisasi Islam kontroversial yang sebelumnya bernama Islam Jamaah/Darul Hadist yang menafsirkan Islam dengan paham tersendiri<sup>169</sup> Namun Ali Murtopo melalui Opsus dan bapilu mungkin ingin mengumpulkan suara yang sebanyak-banyaknya dari Sekber Golkar dengan melindungi dan mensponsori lembaga yang dipandang kontroversial bagi penganut umat Islam yang lain. Nama Darul Hadist kemudian diganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). Organisasi ini secara aktif dibina oleh Jenderal Soedjono Hoermardani dan Jenderal Ali Moertopo berikut Opsus-nya yaitu masa pembinaan dengan naungan surat sakti Bapilu Sekber Golkar:

---

<sup>167</sup> *Tempo*, 17 April 197, hlm 5.

<sup>168</sup> Untuk informasi yang lebih detail mengenai LEMKARI, lihat tanpa pengarang, arsip aliran pemikiran Al Islam LPPI Lembaga Penelitian dan Pengajian Islam, di jalan pahlawan Revolusi no 100 Jakarta atau di <http://www.alislam.or.id/informasi.html>

<sup>169</sup> Organisasi ini dilarang oleh pemerintah atas desakan Majelis Ulama Indonesia, pelarangan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971).

meningkatkan mutu pendidikan disana.<sup>172</sup> Ia juga mengungkap kata-kata dalam logat Surabaya, yaitu, "Nok nduya diatur Pak Harto, Nok Akherat diatur malaikat (di dunia diatur oleh pak Harto di akhirat diatur oleh malaikat).<sup>173</sup> Kyai Musta'in kemudian menarik diri dari calon anggota NU No. 28 untuk DPR dan memilih bergabung dengan Sekber Golkar.<sup>174</sup> Nj. Tadjussubki, bekas ketua Muslimat NU di Jawa Timur bahkan dengan terang-terangan menyatakan menyeberang pada Sekber Golkar.<sup>175</sup> Demikian juga Habib Ali dalam pidatonya yang sebagian besar diyakini sebagai massa NU mengatakan:

*"Laa ikraa fiddin"* setiap djamaah bebas memilih apa sadja, tergantung suasana maupun keadaan, kemudian lebih lanjut ulama itu mengatakan" saja masuk Sekber Golkar tanpa paksaan, tapi karena panggilan hati nurani, karena kejakinan bahwa didalam Golkar lebih luas kesempatan mensji'arkan agama. Namanya saja Golkar, golongan kerdja. Djadi lebih giat menjiarkan Islam.<sup>176</sup>

Dengan bantuan berupa dana pada pondok pesantren dan beberapa tokoh agama Islam yang masuk Sekber Golkar, maka akan memperkuat perolehan suara Sekber Golkar pada pemilu 1971 khususnya pada pemilih yang beragama Islam. Rupanya adanya dukungan penguasa yang tentu saja penguasa akan memberikan keuntungan yang bersifat ekonomis sifatnya, merupakan strategi pemerintah untuk menarik dukungan dari umat Islam dengan merangkul beberapa tokoh Islam untuk dapat dijadikan anggota Sekber Golkar.

---

<sup>172</sup> *Tempo*, 17 April 1971, "Nadahatul Ulama dari Kwintang sampai Djombang", hlm. 8.

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>174</sup> Menuju Muktamar dalam *Tempo*, 4 Desember 1971, hlm.8.

<sup>175</sup> *Tempo*, loc. cit., hlm. 8

<sup>176</sup> *Tempo*, loc. cit., hlm. 8.

## E. Pembentukan Badan Pengendali Pemilihan Umum

Bapilu merupakan badan kampanye Golkar, yang memiliki tugas untuk kampanye dari propinsi sampai dengan kelurahan, dalam tugasnya Bapilu ini banyak bekerjasama dengan para militer di daerah-daerah. Sebagai contoh kasus Indra Prayitno.<sup>177</sup> Seorang perwira Brawijaya ditugaskan secara khusus untuk membantu kampanye Sekber Golkar pada pemilu 1971.

Bapilu mengkampanyekan tema tentang pembangunan dan modernisasi, yaitu dengan mendukung Golkar. Adalah kelompok kino karya pembangunan yang mendesak agar dibuat badan khusus untuk kemenangan Sekber Golkar, agar kemenangan Golkar lebih dapat dipastikan. Dengan keputusan Ketua Umum Sekber Golkar Pusat No. 1407/Sekber Gk/1970 tentang pembentukan Bapilu Sekber Golkar. Ali Murtopo mendapat tugas membantu Bapilu memenangkan Golkar.<sup>178</sup> Tugas ini sejalan dengan Opsus<sup>179</sup>. Badan opsus dan Bapilu dalam perkembangannya bekerja sangat erat sekali.

Tugas pokok Bapilu, yaitu:

### 1. Memenangkan Golkar dalam Pemilu 1971.

---

<sup>177</sup> Ketua Biro Pemenangan Pemilu DPD Golkar Tk.1 Jatim, pada tahun 1971 setelah selesai dari operasi Trisula di Blitar (1967-1968) ia ditugaskan ke Madura mempersiapkan kampanye Sekber Golkar. Kesimpulan dari tulisan yang dibuat Indra Prayitno dalam Ali Salim (penyusun), *op. cit.*, hlm. 65.

<sup>178</sup> "...Opsus selalu bekerja lebih cepat, lebih mudah, karena tidak ada ikatan-ikatan yang secara birokratis harus dilalui oleh aparat-aparat lainnya kalau segala sesuatunya sudah beres, baru dilaksanakan oleh instalansi yang resmi..." dalam *Majalah Express*, 6 September 1971, hlm.18



2. Berusaha merebut suara yang sebanyak-banyaknya dalam pemilu dan dengan demikian mendapatkan kursi semaksimal mungkin di DPR, DPRD I, DPRD II yang mempunyai akibat mayoritas mutlak Golkar di MPR.
3. Memilih, menyusun dan mengajukan calon-calon yang tepat dari Sekber Golkar sesuai Kepres No. 43/1970 dengan sejauh mungkin mengambil dari golkar-golkar yang ada dalam Sekber Golkar.
4. Mempergunakan secara optimal dan maksimal tanda gambar “ Beringin” sebagai sarana memenangkan Golkar.
5. Mengatur dan melaksanakan kampanye di pusat, daerah-daerah pemungutan suara dan sampai ke desa-desa secara efektif dan efisien.

Dalam Raker Bapilu<sup>180</sup> ditekankan bahwa Jawa Timur merupakan propinsi yang dijadikan sasaran utama Sekber Golkar untuk mendulang suara, juga dengan penggunaan mimbar agama, yaitu agama Islam.

Bapilu sebagai badan kampanye di tubuh Sekber Golkar pada pemilu 1971 memiliki struktur untuk tingkat I Jawa Timur, terdiri atas: a) Biro Informasi: bertugas memberikan informasi pada Sekber Golkar untuk bahan yang diperlukan untuk kemenangan Sekber Golkar. b) Biro Pelaksana: yang melaksanakan tugas secara fisik akan mengendalikan pelaksanaan operasi di lapangan, terdiri dari semua anggota dalam Sekber Golkar.

---

<sup>179</sup> Cara kerja yang demikian, tampaknya sengaja diberikan oleh pemerintah dan Presiden bagi orang-orang opsus agar tidak terbentur masalah birokrasi, wawancara dengan Pudji Rahardjo tanggal 21 Juli 2002.

<sup>180</sup> Intruksi Ketua Bapilu No. Ins.240/Bapilu/Sekber GK/1970, hlm. 6 dalam Raker Bapilu Sekber Golkar Seluruh Indonesia, Tjibogo, September 1970, Andreas Pandiangan, *op. cit.*, hlm.170.

Struktur Bapilu tingkat II, mempunyai fungsi yang berat dan memiliki struktur yang lebih lengkap, yaitu, persis dengan tingkat I, dilengkapi dengan: pembina bagi satkar-satkar (Satuan Karya) di kecamatan-kecamatan, serta memiliki pelaksana kampanye dengan tugas menjalankan petunjuk biro pelaksana di tingkat I. Sementara Struktur Bapilu tingkat kecamatan terdiri dari koordinasi Satkar sebagai pelaksana dari kampanye. Selanjutnya di tingkat desa hanya terdiri dari orang-orang Bapilu sebagai bertugas mengkampanyekan Sekber Golkar. Dalam kampanye mengandalkan kampanye pada tokoh-tokoh menteri dan pegawai negeri yang terjun dalam kampanye di Jawa Timur Mendagri Amir Machmud telah datang ke Surabaya dan berkampanye.<sup>181</sup> Juga banyak dari para pegawai negeri yang berkampanye untuk kemenangan Sekber Golkar. Apakah beliau dalam status “cuti” ataukah dinas, tidak menghalangi mereka untuk memperoleh sambutan secara resmi dari pejabat daerah, protokoler dan fasilitas yang lain.

Kampanye Bapilu yang dalam penyelenggaraannya, menggunakan dan dikontrol oleh Kodam selaku pembina Bapilu 1971, yang dalam hal ini: Mayor Jenderal Wahono (Panglima Kodam Brawijaya), Darjono (Intelegen), Dardji (sospol) dan Koesprapto (mantan komandan urusan karya), serta Moch Said (Ikabra) yang bertugas mengadakan pelatihan bagi para kader Sekber Golkar yang diterjunkan sebagai satkar-satkar Sekber Golkar sampai di tingkat bawah. Moch Said yang

---

<sup>181</sup> *Tempo*, “Golkar-Alternatif dan Kemungkinan”, 1mei 1971, hlm. 10.

utamanya sangat bertanggung jawab atas masalah ini.<sup>182</sup> Pada saat adanya Sekber Golkar sebelum pemilu 1971, yaitu untuk mengisi jurkan sampai ke daerah yaitu mewujudkan latihan kilat juru kampanye di gedung Gubeng Masjid (Surabaya). Sistem pendidikan bidang politik yang diberikan oleh Moch Said dan cara penerangan oleh Marzuki (Alm) dari Bangkalan, sedangkan metode intruksi, bagaimana berpidato dan menguasai massa diberikan oleh saya (Tubagus Mochtar Atmadja). Di tahun itu golkarisasi sampai ke desa-desa di Jawa Timur sangat giat dilaksanakan oleh Moch. Said dan pendukungnya dengan kerjasama dengan para birokrat dan militer yang memihak pada Sekber Golkar. Dimana tema-tema kampanye yang diangkat adalah modernisasi dan pembangunan dari Sekber Golkar serta Golkar adalah pembaharu bagi kehidupan politik.<sup>183</sup> Sebelum mencetak satkar Sekber Golkar terlebih dahulu mempersiapkan penatar kader, yang nantinya mempunyai tugas untuk menatar para calon satkar di kelurahannya masing-masing, dimana pendidikan latihan bagi penatar kader satkar ini dilakukan pada tingkat kecamatan.<sup>184</sup>

Bagaimana cara pendidikan dari golkarisasi tersebut adalah bagaimana teknisnya, agar orang lain dapat tertarik atau simpatik. Yang paling penting ialah

---

<sup>182</sup> Dari keterangan Tubagus Mochtar Atmadja (pengurus Sekber Golkar kodya Surabaya 1971), Ali Salim (penyusun), *op. cit.*, hlm. 175

<sup>183</sup> Tentang hal-hal apa yang diberikan, misalnya dapat anda lihat pada lampiran 11.

<sup>184</sup> Seberapa efektif pengaruh dari golkarisasi melalui penataran ini, dapat dilakukan melalui dua pendekatan, *pertama*: dengan jalan membandingkan wilayah yang aktif menjalankan program ini dengan wilayah yang tidak aktif, *kedua*: dengan membandingkan suatu wilayah yang tidak menjalankan program ini kemudian di masa pemilu selanjutnya menggunakan program ini. Keduanya memerlukan perbandingan dari data-data tentang suara pemilih minimal pada dua periode pemilu, maka tidak akan dibahas lebih lanjut karena disini hanya dibahas tentang pemilu 1971. Pola kader ini

bagaimana memenangkan pemilu 1971. Mengenai pelatihan dan teori mengenai cara teknik berpidato, metode pemecahan masalah, teknik diskusi, metode pemecahan masalah, dan lain sebagainya.<sup>185</sup> Sementara kampanye bagi tokoh-tokoh agama, seperti yang ada di dalam GUPPI atau Lemkari di Jawa Timur, ditempatkan pada wilayah lokal, misalnya tokoh GUPPI berkampanye di wilayah Kediri dan dan Madiun.<sup>186</sup>

## F. Peranan Birokrasi pada Kemenangan Sekber Golkar

Birokrasi di Indonesia memiliki proses sejarah panjang . Pada masa kerajaan, birokrasi sebenarnya tidak bekerja untuk masyarakat, namun mereka bekerja untuk raja dan para bangsawan. Mereka lebih terikat pada hierarki atasan daripada masyarakat. Konsep raja, abdi raja, bangsawan dan rakyat biasa sangat kental pada masa itu. Selanjutnya dengan pertimbangan ekonomis pemerintah kolonial tetap mempertahankan kedudukan birokrasi yang telah terjalin sampai di desa-desa. Pada masa ini para birokrat selain harus memberikan keuntungan ekonomis pada para bangsawan, para birokrasi juga dituntut untuk memberikan keuntungan ekonomis pada pihak kolonial. Sementara di masa revolusi dan pendudukan Jepang masa 1942-1949 Harry J. Benda mengatakan, bahwa:

---

pada masa setelah pemilu 1971 menjadi suatu cara meningkatkan jumlah suara bagi Golkar dalam satu wilayah.

<sup>185</sup> Tanpa pengarang Bahan Diklat Golkar, Golkar daerah tingkat II Surabaya, tanpa tahun,, hlm. 49-75.

<sup>186</sup> Lihat Ken Ward, *loc. cit.*, hlm. 77.

*The period of occupation and revolution (1942-1949) could be seen as more interruption in bureaucratic style and structure that were resilient enough to reemerge and flourish modified but not transformed in independent Indonesian.<sup>187</sup>*

(Periode pendudukan dan revolusi (1942-1949) hanyalah sekedar interupsi dari struktur dan bentuk birokrasi yang cukup ulet bermunculan kembali dan tumbuh dengan subur di masa Indonesia merdeka, ada modifikasi tetapi tidak mengalami transformasi).

### **I. Bapakisme**

Perkembangan birokrasi pada masa-masa selanjutnya, menyerupai birokrasi yang telah ada sebelumnya. Kemiripan itu dapat diamati, antara lain: pegawai negeri diorganisir dalam organisasi tunggal yang posisi kepemimpinan dalam ditetapkan dengan tingkat jabatannya dalam suatu birokrasi. Adanya semboyan pegawai negeri adalah abdi negara, jadi terikat pada negara bukan pada rakyat. Lebih jauh birokrasi pada masa orde baru berintikan pola “bapakisme”, dimana dapat didefinisikan:

Karir politik seseorang dalam masyarakat yang semacam ini lebih tergantung pada kecerdikan orang itu dalam memelihara hubungan dan memanfaatkan hubungan pribadi dan hubungan politik. Sebagaimana halnya dalam mendapatkan pekerjaan dan jabatan. Jabatan-jabatan birokrasi ini, lebih banyak ditentukan oleh persetujuan dan penunjukkan dari pemegang jabatan di tingkat atas atau “bapak”<sup>188</sup>

Dalam hubungan birokrasi ini tidak dibedakan antara militer dan non-militer karena semua dapat disamaratakan merupakan pola birokrasi di Indonesia. Sementara

---

<sup>187</sup> Benda, dalam Priyo Budi Santoso, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru*, (Jakarta: PT RajaGrasindo Persada, 1997), hlm. 46.

untuk Jawa timur pola ini juga berlaku di Jawa Timur dimana di masa kerajaan dan kolonial hubungan antara patron-klien masih kental di Jawa Timur. Hubungan yang demikian ini masih membekas pada aparat birokrasi di bawah Orde Baru.

## 2. Monoloyalitas

Birokrasi yang bermotif Bapakisme yang bermakna asal atasan senang. Adanya ketergantungan antara birokrasi di bawahnya terhadap atasan mereka. Lembaga Kokarmendagri sebagai organisasi para birokrat memainkan peran yang besar dalam hal ini. Para kepala-daerah administratif sampai dari gubernur sampai kepala desa secara tidak langsung yang di bawah Kokarmendagri. Yang menjadi penghubung antara rakyat dan pejabat yang lebih tinggi sifatnya untuk mengkampanyekan Sekber Golkar. Para pamongpraja dianjurkan kedatangannya ke rumah-rumah warga yang diragukan kesetiannya pada Sekber Golkar. Sekber Golkar diidentikkan dengan pemerintah agar tercapai suatu pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu Golkar harus mencapai suara sebanyak-banyaknya.<sup>189</sup> Para birokrat menekankan pada para kalangan santri bahwa Al-Our'an tidak mewajibkan seorang muslim memilih partai Islam, sedangkan banyak kiai yang juga anggota Sekber Golkar.

---

<sup>188</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>189</sup> Tidak memilih Golkar berarti diistilahkan akan terjadi kekacauan, seperti massa demokrasi liberal atau demokrasi terpimpin dengan tingkat inflasi yang tinggi, kesimpulan dari wawancara dengan Djiteng tanggal 26 Desember 2002

Para pemilih juga diyakinkan bahwa lowongan kerja di pemerintahan tidaklah tersedia bagi pemilih yang bukan Golkar.<sup>190</sup> Sedangkan di tingkat atas para juru kampanye Golkar mengkampanyekan tentang Golkar yang termasuk golongan yang membangun dan pembaharu bagi masyarakat di Indonesia. Para pegawai yang tergabung dalam Kokarmendagri juga siap untuk mendukung kampanye Sekber Golkar.<sup>191</sup> Mengenai paksaan ini dari kata-kata Jusuf Hasjim (Sekjen NU) dapat dijadikan tolak ukur yaitu: "paksaan dari para birokrasi setempat kepada masyarakat untuk ikut pohon Beringin".<sup>192</sup> Jadi ada semacam paksaan dari para birokrasi di masing-masing agar masyarakat di wilayahnya pada pemilu nanti menaruh pohon beringin. Dari komentar ini jelas para birokrasi memainkan peranan agar para warga di wilayahnya untuk menjadi pendukung Sekber Golkar sehingga pada 3 Juli 1971 menaruh tanda gambar Sekber Golkar.

Utamanya di tahun 1970 dan setelahnya banyak jabatan birokrasi di Jawa Timur, seperti bupati yang dipegang oleh militer.<sup>193</sup> Hal ini sangat mempengaruhi keterikatan birokrasi dengan Sekber Golkar yang banyak dari para tokohnya adalah militer. Hal yang semestinya tidak terjadi adalah bahwa kenyataannya seminggu

---

<sup>190</sup> Meskipun kasus seperti ini dijumpai di Kulon Progo Jateng namun hal tersebut sangat mungkin terjadi di Jawa Timur, William Liddle, *op. cit.*, hlm. 152.

<sup>191</sup> Membangun dengan tema modernisasi pembangunan, keterikatan dengan Kokarmendagri dan birokrasi diakui oleh tokoh Sekber Golkar, wawancara dengan Hudan Dardiri tanggal 20 Desember 2002.

<sup>192</sup> Nadhatul Golkar Dari Kwintang sampai Djombang, dalam *Tempo*, 17 April 1971, hlm. 6.

<sup>193</sup> Pada tahun 1950 jabatan kursi Bupati untuk wilayah Kabupten (Sidoarjo, Ponorogo, Mojokerto, dan Kediri) diisi oleh militer, kemudian setelah 1971 Tuban, Bojomegoro Lamongan, bahkan juga wilayah Sidoarjo, Djombang dan Mojokerto, Pamekasan, Malang, Lumajang dan Pasuruan, Nganjuk, Kediri, Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, Djember, dan Banyuwangi adalah militer Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 60. Lihat pada

sebelum pemungutan suara yang seharusnya merupakan minggu tenang masih digunakan oleh para birokrasi Sekber Golkar untuk mengadakan kampanye, sementara petugas militer disebarkan di seluruh wilayah sampai desa-desa untuk mengamankan minggu tenang bagi partai politik yang mengikuti pemilu 1971 dan militer ini diyakini memperingati pada keluarga atau yang dicurigai terlibat pada partai komunis untuk memilih Sekber Golkar pada pemilu 1971.<sup>194</sup>

PNI yang sebelumnya memiliki dukungan yang kuat secara tidak langsung merasakan gencarnya kampanye Sekber-Golkar. Sumber dana dari birokrasi yang kering, kemudian para pemimpin yang tidak lagi dapat memegang jabatan karena monoloyalitas. Sementara partai NU lebih mobile dalam melakukan gerakan kampanye dengan penempelan tanda gambar, pawai atau rapat umum. Hal ini mungkin karena kecenderungan di tubuh Departemen Keagamaan pada masa 1970 yang mayoritas masih dikuasai oleh orang-orang NU.<sup>195</sup> Namun ketika para tokoh dari kalangan yang bukan dari Sekber Golkar masuk pada kalangan birokrasi, maka otomatis mereka akan meninggalkan partai politik sebelumnya dan masuk pada Sekber Golkar.<sup>196</sup>

Departemen dalam negeri di Jawa Timur daerah yang langsung di bawah Departemen dalam negeri dibagi atas tiga daerah administratif, yaitu propinsi,

---

tanpa pengarang, buku petunjuk *Metropolitan Surabaya dan Jawa Timur*, Penerangan Daerah Militer VIII/ Brawijaya untuk Bupati dan Walikota masa 1971.

<sup>194</sup> Wawancara dengan Pudji Rahardjo, tanggal 21 Juli 202.

<sup>195</sup> Willian Liddle, *op. cit.*, hlm. 155.

<sup>196</sup> Hal ini diakui oleh Hudan Dardiri yang mengatakan bahwa ia adalah orang NU yang kemudian dipecat oleh NU karena ia telah menjadi Bupati Pasuruan (1969). Maka otomatis, ia memutuskan bergabung dengan Sekber Golkar.



kabupaten, dan kecamatan. Masing-masing daerah memiliki wilayah dan hubungan dengan pemerintahan dibawahnya. Kecamatan membawahi kelurahan dengan kepala desa (lurah), yang masing-masing lurah membawahi RW dan RT di wilayahnya. Sementara itu Departemen dalam Negeri di bawah Amir Machmud (Mendagri) telah mengadakan Monoloyalitas.<sup>197</sup>

Keanggotaan bagi Kokarmendagri adalah wajib bagi semua jajaran pegawai Departemen Dalam Negeri, termasuk kepala desa yang dipilih oleh warga desa, meskipun mereka bukan termasuk pegawai negeri namun ada semacam ikatan untuk mendukung atasan mereka yang identik dengan Sekber Golkar. Dimana dengan monoloyalitas pada Sekber Golkar, maka otomatis melemahkan posisi partai PNI.<sup>198</sup>

Dengan adanya monoloyalitas pada Korkamendagri jaminan untuk memilih Sekber Golkar merupakan sesuatu yang berarti. Selain itu Amir Machmud juga mempersilahkan organisasi para pegawai negeri (PGP) untuk masuk dan menyatakan kesetiannya pada Pertiwi (kino GAKARI).

Major Jenderal Sumitro sebagai komandan Brawijaya menekankan rakyat Jawa Timur jangan lagi untuk berpikir tentang politik dan semua perhatian harus tertuju pada perbaikan ekonomi.<sup>199</sup> Melalui kekuatan pamongpraja bekerjasama dengan

---

<sup>197</sup> Formulir Monoloyalitas, lihat lampiran 10.

<sup>198</sup> Semenjak kabinet Ali pertama pada saat hampir pemilu 1955, telah telah mengadakan pergantian personil birokrasi (pamongpraja). Pada personil tingkat atas, posisi sekretaris-sekretaris jenderal dan juga pos-pos perwakilan luar negeri serta tingkat propinsi diganti oleh pendukung PNI, *Tempo*, "Setelah Enam Belas Tahun Apa Jang Sedang Terjadi?", hlm. 8.

<sup>199</sup> Sumitro mengucapkannya pada pertengahan 1966, dikutip *Pewarta Surabaya*, 8 Juli 1965. Hal ini didukung oleh pernyataan Hudan Dardiri yang mengatakan bahwa Sekber Golkar menyetujui program pada masalah ekonomi dan masyarakat agar menjauhkan diri dari masalah politik.

ABRI, pemerintah mengadakan program Bimas, dan juga Inpres (100.000 ribu per desa), yang diklaim adalah berkat usaha Sekber Golkar, disini lagi-lagi para pendukung Golkar memainkan peranannya dengan para lurah-lurah desa untuk kesetiannya pada pemilu 1971.<sup>200</sup> Pada acara rembug desa, para lurah-lurah desa yang sebelumnya telah mendapat bantuan dana bagi desanya diminta untuk menyetujui adanya perbaikan dari pemerintah atas usaha Sekber Golkar. Dengan keluarnya permen 12 dan monoloyalitas ini tokoh muda NU Subchan ZE mengatakan: "permainan politik sudah tidak adil, Mendagri tidak lagi menjadi wasit melainkan sudah menjadi "buldozer".<sup>201</sup> Dalam pernyataannya di Jawa Timur Amir Machmud (Mendagri) mengatakan: "dengan terus terang; Kini saja ingin membuka kartu. Saja tidak lagi mengandjurkan, melainkan saja perintahkan supaya jangan ragu-ragu lagi menusuk tanda pohon beringin nanti."<sup>202</sup>

Sampai sejauh mana keterlibatan birokrasi di tingkat kecamatan, dapat kita ketahui dari pernyataan rapat Muspida di Jombang:

*The Djombang chairman mentions in his introductory speech that in forty days there has been an increase in Golkar membership of no less than 17.000. That is, a daily increase of 400, or an hourly increase of 18. He hopes to "upgrade" this to a rate of increase of one man per minute. He then calls for reports from each sub-district in the regency, which are to be delivered by the sub district officers, tjamats, sitting along the front row on the hall. The first tjamat says that in his sub-district there are 21.000 voters, of whom 9.718 are already Golkar members. The audience applauds. He adds that he is optimistic about increasing this total. The second declares that in his region the qualified*

<sup>200</sup> Bimas adalah program pemerintah, misalnya pemberian pinjaman bagi pembelian pupuk, peptisida bagi para petani, Sedangkan Inpres adalah bantuan bagi desa, sebesar 100.000 per desa pada tahun 1969, misalnya untuk perbaikan irigasi, pembangunan sekolah, dan tempat ibadah Wawancara Hudan tanggal 22 Desember 2002

<sup>201</sup> Dikutip dari Mochtar Masoed, *op. cit.*, hlm.94

<sup>202</sup> *Tempo*, Golkar-Alternatif dan Kemungkinan, 1 Mei 1971, hlm. 10.

*voters total over 30.000. Golkar has only 7.663, he admit with some embarrassment, but it has spread to every village in the sub-district. The chuckles at this red-faced reassurance. The next tjamat concedes a voter/member discrepancy of a good 17.000, at which point the chairman interrupts him and advises that he should stop sleep the afternoon. The audience is delighted. The fourth reports that voter in his sub-district number 16.610 and Golkar membership has reached 8.923. adds that penggarapan ("the job") is continuing. The audience cheers. Next tjamat, aproud smile of succes already on his lips, jumps to his feet and announces: Qualified voters, 9.328; Golkar members, 8, 471. There is huge applause which almost drowns out his final bravado: pengharapan is continuing.<sup>263</sup>*

Kurang lebih artinya:

Seorang birokrat (pembawa acara) dari Jombang menyebutkan dalam Pidato pembukaannya dalam 40 hari keanggotaan Sekber Golkar yang telah meningkat lebih dari 17.000. Oleh karena itu setiap harinya terjadi peningkatan 400 atau setiap jamnya terjadi peningkatan 18. Dia berharap agar dapat lebih ditingkatkan menjadi satu orang setiap menitnya. Ia kemudian mempersilahkan laporan dari tiap kecamatan se-kabupaten Jombang untuk disampaikan di depan para petugas/birokrasi tingkat kecamatan. Dan para camat duduk di bagian depan. Camat pertama yang memberikan laporannya berkata bahwa di daerah kecamatannya ada sekitar 21.000 orang yang berhak memberikan suara dan sekitar 9.718 telah menjadi pendukung/anggota Sekber Golkar. Peserta forum memberikan tepuk tangan. Ia kemudian menambahkan dengan optimis bahwa angka itu akan meningkat. Kemudian pemberi laporan yang kedua memberikan pernyataanya bahwa di daerahnya ada sekitar 30.000 suara yang berhak

<sup>263</sup> Diambil dari rapat di Djombang 16 Maret 1971, para peserta terdiri dari para pegawai negeri, anggota Golkar kecamatan Djombang dan keluarganya, diadakan oleh Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah di Djombang), dan Moch Said sebagai pembicara tamu. Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 72

ikut dalam pemilu dan hanya 7.663 para pendukung Golkar, ia mengakui hal itu dengan sedikit merasa malu akan hal itu. Tapi para pendukung Sekber Golkar itu menyebar di seluruh wilayah di tiap desa di kecamatan. Camat yang berikutnya mengakui anggota yang tidak dapat dipastikan untuk memilih Sekber Golkar berjumlah sekitar 17.000. Pembawa acara memotong pembicaraan tjamat itu agar bekerja lebih keras lagi. Para peserta tampak senang. Laporan yang ke-empat menyebutkan di kecamatan yang dipimpin olehnya ada sekitar 16.610 suara yang berhak dalam pemilu, dan anggota Sekber Golkar sudah mencapai sekitar 8.923. ditambahkan penggarapan suara masih terus berlangsung. Camat selanjutnya dengan tersenyum bangga akan kesuksesannya mengumumkan: jumlah suara 9.328; dan anggota Sekber Golkar 8.471. Pengumuman ini diikuti dengan tepuk tangan yang bergemuruh: penggarapan masih berlangsung.

Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya para birokrasi yang seharusnya menjadi pengawas pemilihan umum, sudah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. mereka bahkan berlomba-lomba untuk dapat memperoleh pendukung bagi organisasi Sekber Golkar di wilayahnya sebanyak-banyaknya, diibaratkan semakin banyak para pendukung Sekber Golkar akan makin menjamin posisi mereka di pemerintahan.

## G. Peranan Militer di Tubuh Sekber Golkar

Peranan yang aktif diambil juga oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, ABRI, terutama angkatan darat yang memiliki teritorial yang diperluas, dengan adanya Kodam, Kodim, Koramil, dan Babinsa. Pada masa itu yang tidak mempunyai hak suara pada pemilihan umum 1971, sepertinya ingin jaminan bagi keamanan dwi-fungsinya, agaknya dwi fungsi ini merupakan sesuatu yang utama selain menjaga kemurnian Pancasila dan UUD 1945.

Semenjak 1969 melalui ketetapan Presiden No. 79 tahun 1969 di tubuh ABRI dibentuk Kepala Staf Kekaryaannya, demi pelaksanaan fungsi kekaryaannya ABRI di bidang politik.<sup>204</sup> Sementara di daerah-daerah dikembangkan Dewan Kekaryaannya Pusat (di tingkat Departemen Hankam), Dewan Kekaryaannya Daerah (di tingkat Kodam), Perwira Koordinasi Kekaryaannya di Propinsi tingkat I dan Perwira Koordinator Kekaryaannya Daerah Tingkat II. Dewan Kekaryaannya ini dibawah pimpinan Letnan Jenderal Darjatmo, Kepala Staf Kekaryaannya Letjen Darjatmo, mengatakan.<sup>205</sup>

... ABRI harus meneliti golongan rakyat yang mana ABRI harus menjalankan partershipnya... Pada dewasa ini golongan karya yang saya sebutkan tadi telah bergabung dengan Sekber Golkar. Memenangkan Pemilu berarti memenangkan Orde Baru... Memenangkan Pemilu berarti :

- a. Rakyat harus kita arahkan agar menusuk tanda gambar Golkar
- b. ... Daerah mana yang perlu penggarapan lebih intensif dibandingkan daerah-daerah lain...

<sup>204</sup> Soebijono, *op. cit.*, hlm. 158

<sup>205</sup> Ceramah Kepala Kekaryaannya Hankam Letjen Darjatmo tanggal 15 September 1970 dalam SC Raker Bapilu, hlm. 1-24, dalam Andreas Pandiangan, *op. cit.*, hlm. 157

Dengan pernyataan dari Darjatmo ini para militer, jelas mempunyai kepentingan dan keinginan untuk dapat memenangkan Sekber Golkar pada pemilu 1971, dengan kerjasama dengan Hansip dan Wanra di seluruh desa di Jawa Timur dimana Hansip dan Wanra ini difungsikan sebagai badan pembantu keamanan di bawah komando dari ABRI, mereka bertugas utamanya dalam pelaksanaan keamanan di desa-desa di seluruh Jawa Timur. Ketidaknetralan dari Hansip/Wanra ini juga dapat diurutkan karena organisasi Hansip/Wanra tergabung dalam salah-satu kuno Sekber Golkar. Maka ketika di masa-masa minggu tenang para aparat birokrasi dan anggota Sekber Golkar menjalankan kampanyenya, anggota Hansip/Wanra ini juga mendukung golkarisasi di desa-desa.

Dewan Kekaryaan Daerah dalam membela kepentingan Sekber Golkar juga mempunyai kepentingan, yaitu Sekber digunakan sebagai alat untuk menjamin dwi fungsinya. Meskipun PNI melalui ketuanya sudah mengatakan akan bekerjasama secara erat dengan ABRI juga IPKI yang mengatakan akan bekerjasama dengan ABRI, namun apa yang lebih menyakinkan daripada para petinggi ABRI yang memimpin Golkar sendiri. Kemenangan Golkar haruslah dijamin, untuk itu organisasi ABRI yang sampai ke desa-desa telah membuat sesuatu yang berarti bagi Golkar. Koramil di setiap kecamatan teritorial di seluruh Jawa Timur mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan, dan digunakan pula untuk mengintimidasi orang-orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan Partai Komunis.<sup>206</sup>

---

<sup>206</sup> Orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung partai komunis dipanggil ke tempat koramil dan jelas diintimidasi, wawancara dengan Pudji Rahardjo tanggal 21 Oktober 2002, mereka

Koramil dengan kerjasama dengan birokrasi di tingkat kecamatan dan kepolisian telah memiliki kewenangan bagi anggota masyarakat bahkan yang bukan dari kalangan komunis (seperti NU dan PNI) untuk sertifikat tidak terlibat dalam Gestapu. Sementara yang dituduh terlibat dalam partai Komunis, baik yang terlibat dalam partai komunis itu keluarga atau orangtua mereka, maka anak dari orangtua dan saudara dari seseorang yang terlibat partai komunis itu, maka mereka akan terkena istilah sampul "D", yaitu yang menyatakan yang bersangkutan adalah keluarga yang terlibat dalam partai komunis.<sup>207</sup> Akibatnya pengawasan pada orang-orang yang terkena sampul "D" sering dicurigai oleh aparat Kodam, Kodim, Korem, Koramil, sampai Babinsa.

Pada tahun tahun 1968 daerah Blitar Selatan kembali terdapat gerakan komunis, yang segera merambat pada daerah Malang, Blitar dan Tulungagung, sehingga, membuat para militer lebih ketat dalam mengawasi para pamong praja dan penduduk di wilayah Jawa Timur, seakan-akan semua masalah birokrasi hendak diambil alih oleh militer. Para lurah yang dianggap pendukung atau mempunyai kecondongan pada PKI, langsung diganti.<sup>208</sup> Di setiap desa terdapat Babinsa (Bintara Bina Desa) yang mempunyai hubungan aktif dengan para kader daerah, tentu saja

---

jelas mengalami trauma akibat pembunuhan yang tidak sedikit pada masa 1965, dimana militer (RPKAD) terlibat dalam pembasmian PKI di Jawa Timur. Juga kasus di Jawa Tengah dimana bekas anggota PKI di Jawa Tengah dipanggil ke Korem dan diharuskan memilih sekber Golkar, lihat Mochtar Masoed, *op. cit.*, hlm. 95.

<sup>207</sup> Pudji Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>208</sup> Sangat sulit untuk menuliskan data tentang nama lurah yang diganti karena dituduh mendukung PKI, namun pada masa setelah 1965 terjadi pembaruan dan penataan kembali birokrasi pemerintahan di Jawa Timur.

hubungan yang baik ini membantu Sekber dalam pergerakan dan penggalangan suara dengan perlindungan dengan jaminan keamanan pada anggota Sekber Golkar.

## H. Organisasi *Onderbouw*

Organisasi Sekber Golkar di Jawa Timur memperoleh dukungan dari Kokarmendagri, namun selain Kokarmendagri Sekber Golkar juga memperoleh dukungan yang banyak dari organisasi karyawan Brawijaya. Ikatan Keluarga Brawijaya (Ikabra), didirikan pada 1961 dengan tujuan untuk menanggung para anggota militer daerah VIII/ Brawijaya untuk dikaryakan, baik itu dikaryakan di perusahaan negara hasil nasionalisasi (di Jawa Timur seperti P.T. Boma (N.V. De Bomeo))<sup>209</sup> ataupun dikaryakan sebagai para Bupati di Jawa Timur, dalam menghadapi pemilu 1971 Sekber Golkar sangat memerlukan kampanye di Jawa Timur. Selain SOKSI dan MKGR yang mengalami kelambatan dalam pengembangannya di Jawa Timur.<sup>210</sup> Namun Ikabra merupakan organisasi di bawah Golkar yang terbesar kedua di Jawa Timur.<sup>211</sup> Ikabra dengan ketuanya Moch Said dalam perkembangannya mirip SOKSI atau MKGR.<sup>212</sup> Organisasi ini dapat

<sup>209</sup> Yang memproduksi alat teknik, seperti motor diesel, pompa dan lain-lain, lihat tanpa pengarang buku petunjuk Metropolitan Surabaya dan Jawa Timur

<sup>210</sup> Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 65

<sup>211</sup> Yang pertama adalah Kokarmendagri. Perlu diperjelas meskipun SOKSI, MKGR, KOSGORO merupakan organisasi yang besar namun masing-masing memiliki daerahnya sendiri-sendiri, misalnya MKGR yang merupakan organisasi di bawah Sekber Golkar terbesar di Bali), Ken Ward, *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>212</sup> Kekuatan Golkar pada awal berdirinya yang terbesar terdapat pada Trikarya (SOKSI, MKGR, KOSGORO), hal ini diungkapkan oleh sebagian besar anggota Golkar yang ditemui penulis, misalnya Ambon, Djiteng, Fakeh. Persamaan ketiganya organisasi ini terutama dalam usahanya untuk perekrutan orang-orang yang tidak terikat dengan partai politik untuk menjadi anggotanya, namun



dikatakan diresmikan oleh para komandan Brawijaya, terbukti dengan komandan pasukan Brawijaya Basuki Rahmat telah memberikan ijin konferensi bagi organisasi ini pada Juli 1965. Keuntungan yang didapat dari organisasi ini adalah peraturan menteri No. 12. Organisasi ini telah berhasil mengkaryakan anggotanya untuk mengisi keanggotaan badan legislatif (DPRD I dan II) yang ditinggalkannya oleh peraturan menteri No. 12.<sup>213</sup>

Di bawah pimpinan Moch Said Ikabra menjadi sebuah lembaga yang terbuka bagi para veteran, karyawan ABRI, pensiunan ABRI dan individu yang tidak terkait dengan partai politik. H. Moch. Said adalah mantan PETA dengan jabatan Sodancho (1944-1945), karirnya meningkat dengan pesat pada tahun 1954-1961 ia menjadi Wa Ass. Kodam VIII/ Brawijaya kemudian 1961-1967. Ia memimpin sebuah biro Pariwisata di Jawa Timur. ia memiliki hubungan yang erat dengan para pengusaha Cina di Tunjungan, bahkan ia sering kali mengadakan tempat perundingan politik di Jakpot (Tunjungan Kaliasin).<sup>214</sup>

Pada Konferensi Ikabra di bulan Juni 1970, kolonel Dardji, seorang perwira Brawijaya memberikan target objek yang dapat ditarik untuk memilih Sekber Golkar pada pemilu 1971, yaitu:

1. Para keluarga ABRI
2. Para pekerja sipil di lingkungan Hankam dan para keluarganya

---

perlu dibedakan bahwa sebenarnya Ikabra bukanlah organisasi yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai Kino sendiri seperti SOKSI dan MKGR, namun memainkan peranan yang lebih besar dari organisasi trikarya di tubuh Sekber Golkar

<sup>213</sup> Menurut Ken Ward, *loc. cit.*, hlm. 11. Kekosongan itu berkisar separuh dari di tingkat propinsi dan separuh di tingkat Kotamadya/ Kabupaten.

3. Para pegawai negeri yang tidak terkait (tidak diijinkan) untuk ikut pada partai politik
4. Para pegawai negeri yang setia pada pemerintah dan para keluarganya
5. Para Hansip/Wanra (Pertahanan sipil dan Perlawanan Rakyat), para anggota veteran dan pramuka dan Pepabri
6. Orang-orang desa yang murni belum terikat pada partai politik
7. Para petani, pegawai swasta, nelayan, dan sebagainya yang masih belum terikat partai politik
8. Guru-guru agama, kalangan intelektual, pemuda/ pelajar SMU dan Mahasiswa yang tidak terikat pada partai politik.
9. Wanita, artis, atlet, dan sebagainya
10. Dan banyak lagi<sup>215</sup>

Dengan daftar ini membuat kategori yang mudah, untuk mewujudkan suara dan sasaran bagi Sekber Golkar untuk memenangkan pemilu. Perhatikan urutan yang otomatis adalah anggota Sekber Golkar, yaitu para keluarga ABRI; otomatis mendukung Ikabra, karena Ikabra merupakan organisasi yang didirikan oleh para anggota ABRI di Jawa Timur, sementara Ikabra mendukung Sekber Golkar, urutan nomor dua, yaitu: para pekerja Hankam (para sipil) yang bekerja di departemen Hankam, mereka memiliki suatu organisasi, misalnya PPALRI yang tergabung dalam organisasi sekber Golkar dan tergabung dalam kino Hankam. Urutan nomor 3 adalah

---

<sup>214</sup> Seperti dituturkan Pitut Soeharto, dalam Ali Salim, *dk. op. cit.*, hlm. 95 dan 206.

<sup>215</sup> Hasil Musyawarah Kerdja, pidato Dardji, hlm. 5., dan Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 69.

pegawai negeri, yang dilarang untuk ikut partai politik, namun memiliki hak suara dan diajarkan untuk memilih pohon beringin sebagai monoloyalitas digambarkan Sekber Golkar bukanlah partai politik, namun organisasi yang membangun. Urutan nomor empat adalah para keluarga pegawai negeri, yang pasti suaranya sangat diharapkan.. Untuk urutan nomor 1-4 sebenarnya tanpa dimasukkan dalam daftar adalah dapat dipastikan para pendukung Sekber Golkar. Yang paling penting adalah bagaimana membuat strategi agar orang-orang desa terikat pada Sekber Golkar, melalui berbagai kerjasama antara Birokrasi, Militer, dan para anggota Sekber Golkar hal itu mungkin akan terlihat mudah dilakukan.

Para Hansip/Wanra dimana organisasinya tergabung dalam kino Hankam, adalah sudah dapat dipastikan pendukung dari Sekber Golkar, meskipun Hansip/Wanra bukanlah anggota ABRI, namun dalam kewenangan dan hubungannya mereka di bawah koordinasi ABRI.

Dari katagori yang dibuat adalah para istri dari anggota ABRI, misalnya: Persit (AD), Bhayangkari (Polisi), Jalasenastri (AL), PIA Ardhya Garini (AU), dimana menurut Djiteng Soetojo<sup>216</sup> Para istri anggota ABRI sudah pasti memberikan suaranya ke Sekber Golkar, hal ini karena yang membidani Sekber Golkar adalah para militer dan ketika seseorang menjadi militer, para anggota militer sudah tidak dapat lagi menyalurkan aspirasinya karena perintah dari para atasan haruslah dituruti. Perintah dari atasan adalah untuk mendukung Golkar. Pengaruh para istri ABRI

sangat besar pengaruhnya karena jumlah anggota ABRI di Jawa Timur sangat banyak sekali juga biasanya para istri dari perwira ABRI adalah dari kalangan berpendidikan sehingga mungkin dapat mempengaruhi orang-orang yang dikenalnya untuk mendukung Golkar dalam memperoleh mayoritas pada pemilu 1971. Apalagi beberapa dari istri menjadi calon anggota DPRD dan DPR Pusat mewakili Sekber Golkar.<sup>217</sup>

Dari kategori yang tersebut, juga diharapkan suara dari veteran. Perlu dibedakan antara veteran yang dari ABRI atau veteran yang pernah berjuang pada masa kemerdekaan, namun tidak meneruskannya ke jenjang ABRI. Untuk Hankam yang veteran yang bukan ABRI merupakan pilihan untuk memilih partai politik namun bagi para bekas anggota ABRI sudah menjadi keharusan untuk memilih Golkar pada Pemilu nanti, yang perlu diperhatikan adalah semua organisasi veteran telah mendaftarkan diri dan tergabung dalam kino di tubuh Golkar.

Kategori kesembilan untuk dari daftar yang dibuat adalah organisasi wanita, artis dan para olahragawan. Namun untuk kategori ini dan kategori yang lain tidak memperoleh perhatian yang serius di Jawa Timur, dan perhatian yang serius justru diperlihatkan pada masih banyak lagi, dimana hal ini diwujudkan pada Korps

---

<sup>216</sup> Wawancara dengan Djiteng Soejoto tanggal 26 Desember 2002, para atasan mereka adalah para pemimpin / tokoh terkemuka dari Sekber Golkar sementara dimungkinkan juga komandan-komandan militer daerah-daerah juga loyal pada Sekber Golkar.

<sup>217</sup> Misalnya Ny Ibnu Saleh anggota DPR.MPR Jatim mewakili Jawa Timur (Persit)

Karyawan Pengemudi Betjak Indonesia.<sup>218</sup> yang kemudian sering berkeliling kota dan meneriakkan “Hidup Golkar”

Moch Said dalam konferansi itu mengetengahkan target suara bagi Sekber Golkar yaitu setiap kabupaten suara yang dicapai dengan formulasi:  $40/2 - (1/5 \times 41) \times 10.000 = 120.000$ .<sup>219</sup> Sedangkan untuk propinsi ia memformulasikan  $75 + 1/2 - (1/5 \times 75) \times 200.000 = 4.600.000$ .<sup>220</sup> Dengan formulasi ini Golkar minimal harus mampu menghasilkan 120.000 suara di tiap kabupaten dan sekurang-kurangnya memperoleh 4.600.000 untuk propinsi di Jawa Timur. Pada tahun itu ada 8.294 desa/kelurahan di wilayah Jawa Timur, maka tiap kelurahan harus mencapai 554 suara di tiap kelurahan seluruh wilayah Jawa Timur.<sup>221</sup>

## I. Kampanye Sekber Golkar/ Golkar

Kampanye dari Golkar yang tidak dapat dianggap remeh adalah adanya “safari tour”, yaitu tour beberapa artis dari Jakarta dan artis lokal yang diorganisir dan didanai oleh Bapilu. Dalam menjalaninya tour dari satu tempat ke tempat lain safari ini dikawal oleh banyak polisi, mobil (jep) militer, dan juga banyak sekali “betjak”

<sup>218</sup> Mereka diberikan uang sebesar 50 rupiah dan kaos dengan tanda lambang Golkar, Ken Ward, *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>219</sup> Formulasi ini didapat kemungkinan dari jumlah badan Legislatif terbanyak untuk daerah tingkat II sesuai UU yaitu 40 kemudian dibagi dengan 2, dikurangi dengan penunjukkan bagi golongan karya dan ABRI, yaitu 1/5 dari 40 orang yang kemudian dikalikan dengan pertimbangan pemerintah yang menetapkan 10.000 suara untuk satu orang wakil di tingkat II.

<sup>220</sup> Formulasi ini kemungkinan didapat dari jumlah perwakilan Legislatif terbanyak sesuai dengan UU yaitu 75 karena jumlahnya ganjil ditambah satu kemudian dibagi dua dikurangi dengan penunjukkan dari golongan karya dan ABRI sebesar 1/5 dikalikan dengan 200.000 yaitu pertimbangan pemerintah untuk jumlah suara yang diwakili oleh satu orang wakil di tingkat I. sebagai perbandingan

yang menggunakan kaos dengan tanda Golkar dan sepanjang perjalanan meneriakan "Hidup Golkar". Safari tour berkeliling dari kabupaten/kotamadya di Jawa Timur, dari Bangkalan atau Bondowoso, sampai ke Pamekasan atau Probolinggo, dan kota-kota lainnya' dengan tujuan mengumpulkan massa yang banyak sekali dan memasukkan ideologi politik. Pada saat kampanye penyebutan nama Golkar tanpa menyertakan Sekber sudah mulai tampak, meskipun perubahan nama Sekber Golkar menjadi Golkar resmi dinyatakan oleh keputusan ketua umum pada tanggal 17 Juli 1971.

Dalam "safari tour", yang diisi oleh nyayian, pembawa acara mengutarakan, bahwa partai politik di masa lalu telah mengacaukan Indonesia, mengabaikan pembangunan ekonomi, yang paling diperlukan sekarang adalah berkarya dan menghentikan berpikir tentang politik. Ditambahkan: Golkar adalah Pancasila, maka jangan antiGolkar, Golkar adalah pemerintah, melaksanakan pembangunan, seperti: mesjid dan kantor-kantor kabupaten yang sangat baik, terbaik di Asia; Golkar adalah ABRI, jika menjelekkkan Golkar maka ABRI akan bertindak. Setelah masa kampanye safari tour berakhir, maka Golkar di Jawa Timur akan melaksanakan kampanye dengan hanya ludruk, dan pertunjukkan musik yang tidak terlalu besar.<sup>222</sup>

---

saja untuk DPR seluruh Indonesia yang berjumlah maka pertimbangan pemerintah bahwa sedikitnya 400.000 penduduk terwakili dalam satu orang anggota DPR pusat.

<sup>221</sup> Ken Ward, *Ibid.*, hlm. 70-71.

<sup>222</sup> Mengenai safari Tour, lihat Ken Ward, *loc. cit.*, hlm. 86-87.

## J. Proses dan Hasil Pemilu 1971 di Jawa Timur

Kampanye melalui media massa di masa 1971, tidak ada partai politik-pun yang bisa mengandalkan kampanye melalui media massa, mungkin PNI yang mempunyai kekuatan di daerah-daerah dengan koran “suluh Marhaen”.<sup>223</sup> Sedangkan NU dengan Duta Masyarakat, hanya memiliki jumlah pembaca yang kecil. Sementara harian Abadi, yang dahulu sering digunakan oleh Parmusi, nampaknya menolak pemberitaan yang menyokong Parmusi. Harian Kompas yang mempunyai hubungan dengan partai Katolik, dan Harian Sinar Harapan yang dihubungkan dengan Parkindorupanya tidak menggunakannya media massa tersebut dalam kampanye.<sup>224</sup> Keuntungan dari Sekber Golkar misalnya didapat ketika sebuah harian menyerang kehidupan politik di masa lalu partai-partai politik, dan hal seperti ini banyak dilakukan oleh beberapa koran di Jawa Timur dan berbagai kota besar di Indonesia, kampanye yang efektif dan digunakan adalah penggunaan media TVRI dan RRI, dimana partai politik dan Golkar menggunakannya dengan diatur oleh jadwal.

Pemulaan kampanye dimulai pada 27 April, Golkar langsung memulai dengan poster-poster di seluruh jalan-jalan di Jawa Timur, tema poster tentang pembangunan, yang dikenal dengan “akserasi modernisasi”, yaitu pembangunan Pelita lima tahun, Repelita pembangunan dua puluh lima tahun, dan Golkar sebagai

---

<sup>223</sup> “Edaran Sekkab dan 12 Larangan”, 8 Mei 1971, dalam *Tempo*, hlm .6.

<sup>224</sup> *Tempo*, *Ibid.*, hlm. 6.

golongan pembaharu yang membangun banyak sekolah dan tempat-tempat ibadah, membangun perpolitikan gaya baru, dan pemilih seharusnya "ikut zaman".<sup>225</sup>

Meskipun organisasi yang bergaris pada partai politik, seperti GMNI pada PNI atau CGMI pada PKI, nampaknya di Jawa Timur usaha Golkar untuk memasuki dunia kampus/mahasiswa kurang mendapat perhatian. Tahun 1971 awal menjelang Pemilu, ada usaha dari beberapa kalangan Sekber Golkar untuk membentuk "mahasiswa Golkar"<sup>226</sup> namun hal ini sampai berlangsungnya Pemilu 1971 tidak ditemui adanya organisasi mahasiswa Golkar.

Subchan (tokoh NU) menggunakan istilah jihad, namun penggunaan istilah "jihad ini mendapat tanggapan dari Presiden Soeharto dalam pidatonya: "Bahwa setiap usaha "jihad" yang selalu dikobar-kobarkan golongan tertentu akan dihadapi oleh pemerintah dengan semangat jihad pula."<sup>227</sup>

Propinsi Jawa Timur merupakan daerah pemilihan yang menarik dan unik untuk dibahas dalam perolehan suara, hal ini karena pertama jumlah penduduk terbesar di Indonesia adalah di Jawa Timur, jumlah penduduk di Jawa Timur menurut sensus adalah 24.808.808 jiwa,<sup>228</sup> kemudian di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 114.190.163 penduduk Jawa Timur sekitar 21,7% dari seluruh wilayah Indonesia.

---

<sup>225</sup> Wawancara dengan Hudan Dardiri, tanggal 20 Desember 2001

<sup>226</sup> Mengenai organisasi mahasiswa Golkar ini, tokoh Sekber Golkar terkemuka Umar Said dan juga Anton Prayitno (tokoh organisasi Surabaya yang bergabung dengan Sekber Golkar 1971), mengatakan tidak setuju dengan dibentuknya mahasiswa Golkar, sampai pada akhir Pemilu 1971 mahasiswa Golkar ini tidak ditemui di Jawa Timur, seperti yang ditulis Anton Priyatno, Ali Salim, dkk (penyusun), hlm. 23-25.

<sup>227</sup> Mochtar Masoed, *op. cit.*, hlm. 94

<sup>228</sup> Lihat Penerangan Daerah Militer VIII/Brawijaya, buku petunjuk: *Metropolitan Surabaya dan Jawa Timur* (Surabaya: Kodam VIII/Brawijaya), hlm. 5.



dengan jumlah penduduk yang paling padat, jumlah perwakilan di propinsi Jawa Timur paling banyak diantara propinsi lain di Indonesia, dengan pedoman setiap jumlah penduduk 400.000 diwakili perwakilannya namun ditentukan jumlah perwakilan DPR di Jawa Timur berjumlah 63 orang.

Masa minggu tenang Kampanye berlangsung selama 60 hari (27 April - 25 Juni) minggu tenang (26 Juni-2 Juli), ditulis oleh tempo sebagai "minggu yang tak begitu Tenang."<sup>229</sup> Hal ini terkait dengan penstopan koran pada tanggal 3 Djuli itu, misalnya koran Duta Masyarakat milik NU sebelum hari pemungutan suara tanggal 3 Juli, juga majalah Tempo yang distop terbitnya untuk tanggal 3 Juli, dilarang oleh Kopkamtib. Sementara koran Kami yang dalam tajuk rencananya menganjurkan untuk memilih Golkar juga dibredel sementara, selain itu Komkaptib di Jawa Tengah telah menangkap Jusuf Merukh, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia Jawa Tengah dengan tuduhan terlibat komunis.<sup>230</sup> Sementara di Jawa Timur anggota DPRD partai NU As'ad Umar ditangkap oleh Kodim.<sup>231</sup> Dimungkinkan karena kampanye yang menyudutkan Pancasila, partai NU-pun tidak dapat berbuat banyak untuk membebaskannya. Militer dan Kopkamtib memang memiliki kewenangan yang mutlak dalam menjaga pemilu dan menjaga keamanan negara. Maka militer sering menggunakan cara-cara yang berlebihan untuk mencapai tujuan dari maksudnya, yaitu mengamankan negara.

---

<sup>229</sup> *Tempo*, "Minggu Jang Tak Begitu Tenang", 10 Djuli 1971, hlm 7

<sup>230</sup> *Tempo*, "Partai Muslimin Korban Fitnah", 6 Mei 1972, hlm 14.

<sup>231</sup> Pokrol dan Tapol, dalam *Tempo* 29 Mei, 1971

Sementara perlu disadari memang saat itu keadaan masyarakat Indonesia yang baru pertama kali mengadakan pemilu pada Orde Baru, maka terdapat kekacauan, misalnya di beberapa TPS di desa Lempungsari (Jember), terdapat beberapa TPS yang terbuat dari plastik.<sup>232</sup> Koran Tempo menuliskan bahwa adalah penusukan yang dobel untuk TPS kampung dan TPS kantor utamanya terjadi di Pertamina dan beberapa kantor lain, diketahui juga ada seorang yang masih mengenakan seragam pegawai negeri namun masih melakukan penusukan tanda gambar di kampung.<sup>233</sup>

Pada Pemilu 1971, digunakan sistem perwakilan berimbang; dimana suara dibagi atas daerah pemilihan, sedangkan perwakilan DPR, ditentukan dengan stensel daftar (Penetapan daftar dengan nomor urutan bagi tiap calon yang diajukan).

Urutan nomor urut peserta pemilu untuk masing-masing partai dan Golkar, sebagai berikut:

1. KATOLIK
2. PSII
3. NU
4. PARMUSI
5. GOLKAR
6. PARKINDO
7. MURBA
8. PNI
9. PI.PERTI
10. IPKI

---

<sup>232</sup> Golkar-pun Meninggalkan Partai-partai dalam *Tempo* 10 Juli 1971, hlm. 7.

Kandidat calon anggota DPR Golkar ditentukan oleh Moch Said dengan negosiasi dengan para pemimpin KINO dan Kokarmendagri di Jawa Timur,<sup>234</sup> calon anggota dibagi atas: daerah pemilihan tingkat II, tingkat I dan daerah pemilihan Pusat. Calon dari sipil, misalnya Samadikum kandidat nomor 1, Suwondo kandidat nomor 3 untuk pusat, dan nomor 2 untuk propinsi Sukardjono nomor enam untuk pusat dan nomor 3 untuk propinsi Machmud Sosroadiputro nomor 16 untuk pusat dan nomor 4 untuk propinsi. Para veteran dan pesiunan ABRI, misalnya Kolonel Surachman no 43 untuk pusat, Ridwan Hasjim nomor 34 untuk pusat dan 28 untuk Jawa Timur. Kandidat dari para organisasi wanita misalnya Ny. Ibnu Saleh. Kandidat dari ulama bisa disebutkan Karim Hasjim no 21 untuk pusat (anak dari Kyai Hasjim Asyari )

Dengan berbekal suatu penggalangan suara yang seperti tersebut di atas, dan menggunakan segala cara, Golkar di Jawa Timur yang dalam kampanye selalu menekankan "progam yes politik no"<sup>235</sup>, mengkampanyekan tentang pembaruan kehidupan. Dalam kampanye 1971, harian kompas menuliskan bahwa ruang kampanye partai-partai sempit, ruang Golkar leluasa, suasana kampanye seperti ini tidak seperti masa kampanye pada pemilu 1955 yang penuh gelora<sup>236</sup> disebutkan bahwa dalam kampanye Golkar banyak terdapat Hansip/wanra yang berjaga-jaga. Di beberapa tempat diketahui anggota Hansip memegang tiap kartu suara yang sudah

---

<sup>233</sup> *Tempo*, *Ibid*, hlm. 9.

<sup>234</sup> Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 81.

<sup>235</sup> Wawancara dengan Hudan Dardiri, tanggal 20 Desember 2001

<sup>236</sup> Beban Kampanye, dalam *Tempo* 8 mei 1971, hlm. 6.

dicoblos.<sup>237</sup> Pada saat minggu tenang, komandan Brawijaya mengirimkan pasukan pada tiap-tiap desa di wilayah Jawa Timur. Pasukan Brawijaya dan RPKAD, yang terlibat pada pemberantasan PKI, membuat para bekas/pendukung partai ini, menjadi gelisah. Hal ini seperti jika mereka tidak memilih Golkar, maka akan terjadi peristiwa seperti pada tahun trauma 1965.

Pada malam hari sebelum hari pemilihan umum, Presiden Soeharto mengatakan dalam pidatonya di radio dan televisi, tentang seruan bagi warganegara Indonesia untuk menyalurkan hak mereka dalam pemilihan umum dengan cara-cara yang sudah ditentukan serta mendukung Orde Baru.<sup>238</sup>

Hampir di berbagai kotamadya dan kabupaten di Jawa Timur dimenangkan oleh Golkar. Eks karesidenan Surabaya: kotamadya Surabaya perolehan suara Golkar mencapai 57%, perolehan suara Golkar di kotamadya Mojokerto mencapai 59% perolehan suara di kabupaten Jombang 51%, di kabupaten Sidoardjo perolehan suara Golkar 47%, kabupaten Surabaya perolehan suara Golkar 36%, di kabupaten Mojokerto perolehan suara Golkar mencapai 64%. Daerah-daerah eks karasidenan Surabaya termasuk kota-kota besar, kegiatan Golkar antara lain yang dimotori oleh Moch Said berupa penataran kader Golkar berpusat di Surabaya. Selain itu kemungkinan pemilih memilih Golkar karena masyarakat di kota merasa Golkar sebagai pembaharu dari kehidupan politik di masa sebelumnya yang kurang terfokus

---

<sup>237</sup> Oleh koran ini tidak disebutkan wilayah yang spesifik, tentang anggota Hasip yang memegang tiap kartu suara yang telah dicoblos. Namun hal ini sebagai gambaran saja bahwa Hansip mempunyai peranan dalam pemilihan umum 1971. Dan Golkar-pun Meninggalkan Partai-Partai dalam *Tempo*, 10 Juli 1971, hlm. 8.

<sup>238</sup> Masashi Nishihari, *op. cit.*, hlm. 40.

pada ekonomi. Peran pegawai-pegawai negeri juga sangat besar pada perolehan suara dari Golkar. Sedangkan perolehan suara Partai Islam modern Parmusi memperoleh suara yang sangat sedikit sekali di eks karasidenan Surabaya. Eks karesidenan Madura yang merupakan daerah dimana penduduknya adalah pemeluk agama Islam yang kuat, yang terdiri dari Pamekasan, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Pamekasan perolehan suara Golkar hanya mencapai 28%, di daerah Bangkalan perolehan suara Golkar mencapai 21%, di Sampang dan Sumenep perolehan suara Golkar mencapai 18% dan 27%. Bandingkan dengan perolehan suara NU di Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep, yaitu: 48,69%, 75,93%, 73,52%, 66%. Daerah eks karasidenan Madura ini perolehan suara dari partai Islam tradisional, seperti NU sangat besar di bandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah Jawa Timur. Partai NU berhasil mengalahkan perolehan suara Golkar di daerah ini. Kemungkinan keterikatan ikatan tradisional dan peran dari para pemuka agama yang sebagian besar anggota dari partai NU telah menjamin kemenangan dari partai NU di daerah ini.

Eks karasidenan Malang perolehan suara Golkar di kotamadya Malang mencapai 58,54%, kotamadya Pasuruan jumlah suara Golkar mencapai 39,67%, perolehan suara Golkar di kotamadya Probolinggo mencapai 58%, kabupaten Malang perolehan suara Golkar mencapai 58%, kabupaten Lumajang perolehan suara Golkar mencapai 65%, kabupaten Probolinggi perolehan suara Golkar mencapai 48%.

Eks karasidenan Besuki jumlah suara Golkar di kabupaten Jember mencapai 45%, jumlah suara Golkar di kabupaten Bondowoso mencapai 33%, jumlah suara

Golkar di kabupaten Banyuwangi jumlah suara Golkar mencapai 49%. Eks karasidenan Madiun perolehan suara Golkar di Kotamadya Madiun mencapai 73%, perolehan suara Golkar di kabupaten Ngawi mencapai mencapai 70%, perolehan suara Golkar di kabupaten Madiun mencapai 73%, perolehan suara di kabupaten Magetan perolehan suara Golkar mencapai 64%, perolehan suara Golkar di kabupaten Ponorogo mencapai 69%, perolehan suara Golkar di kabupaten Pacitan mencapai 85%. Wilayah Madiun yang sebelumnya terdapat pemberontakan PKI perolehan suara Golkar mencapai 70%, hal ini dimungkinkan karena tekanan dari para aparat militer kepada keluarga dan simpatisan PKI untuk memilih Golkar.

Eks karasidenan Kediri perolehan suara Golkar di kotamadya Kediri mencapai 58%, perolehan suara Golkar di kabupaten Blitar mencapai 79%, perolehan suara Golkar di kabupaten Nganjuk 65%, perolehan suara Golkar di kabupaten Trenggalek 76%, perolehan suzra di kabupaten Tulungagung 64%.

Eks karasidenan Bojonegoro perolehan suara Golkar di kabupaten Bojonegoro mencapai 71%, perolehan suara di kabupaten Lamongan mencapai 63%, perolehan suara di kabupaten Tuban mencapai 75%.

Perolehan suara Golkar untuk seluruh propinsi Jawa Timur adalah 54,9%, dan mendapatkan 35 kursi, suara ini di bawah rata-rata perolehan Sekber Golkar secara nasional yaitu sejumlah 62,80%, dengan jumlah suara tersebut perolehan suara di Jawa Timur menyumbangkan 19,9% dalam perolehan suara di tingkat nasional, dan menyumbangkan 15,4% kursi secara nasional.

Partai NU di Jawa Timur memperoleh 35,1% dan mendapatkan 22 kursi, sedangkan jumlah ini lebih besar dari jumlah perolehan suara secara nasional dari partai NU, yaitu sebanyak 18,67%, partai NU memberikan kontribusi suara nasionalnya sebanyak 42,9%, partai NU di Jawa Timur memiliki pemilih dibandingkan dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia.

#### K. Sekber Golkar/Golkar setelah Pemilu 1971

Setelah perolehan suara yang mayoritas pada pemilu 1971, Sekber Gokar merubah namanya berdasarkan keputusan dari Mandataris Ketua Umum Sekber Golkar Sukowati No. Kep. I/VII/Golkar/1971 pada 17 Juli 1971, nama Sekber Golkar menjadi Golkar dan lembaga Kino tidak dipergunakan lagi.<sup>239</sup> Pada tanggal 15 Oktober pada amanatnya: Jenderal M. Panggabean menjelaskan tentang tujuan dari Golkar dan Orde Baru, yaitu:

Golkar selama ini dan untuk waktu-waktu jang akan datang berada di bawah pembinaan Departemen Hankam atau djelasnya berada di bawah pembinaan Markas Komando ABRI, kedua kata Panggabean," kerjasama, kesatuan dan persatuan antara anggota DPR jang ABRI dan non-ABRI harus diusahakan sebaik-baiknya.<sup>240</sup>

Dari keterangan ini Golkar sebagai organisasi politik menjadi kurang idependen dan selalu keputusan yang diambil dari atas, utamanya militer yang

---

<sup>239</sup> Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya, *Sejarah Perkembangan Golkar*, tanpa penerbit tanpa tahun, hlm. 17, lihat juga Andreas Pandiangan *op.cit.*, hlm. 56-57. Juga Ridwan Saidi *Seri Pendidikan Politik...*, *op. cit.*, hlm.7-8.

<sup>240</sup> Panggabean waktu itu sebagai Wakil Ketua Pembina I DPD Golkar, Golkar Peringatan Panggabean dalam *Tempo* 30 Oktober 1971, hlm. 7

mungkin ingin menunjukkan kekuasaannya di tubuh Golkar. Sehingga kino-kino yang pada awalnya merupakan organisasi yang membentuk Golkar (awal terbentuknya masih bernama Sekber Golkar) menjadi kurang berfungsi dan terkesan dikurangi, sampai pada akhirnya kino-kino yang membentuk Golkar dihapuskan. Pembubaran kino-kino membuat perubahan nama Sekber Golkar secara resmi digantikan dengan Golkar.

Tahun-tahun setelah pemilu 1971 Golkar mempunyai peran yang besar, bahkan vital bagi perpolitikan di Indonesia. Hal ini karena kemenangan dari Golkar pada pemilu sehingga hampir-hampir tidak ada partai oposisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan yang didominasi oleh orang-orang dari Golkar.